

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK

TAHUN 2023

ASSESSMENT AKREDITASI IS
LABORATORIUM PENGU
Lombok B



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

#2023
HKP THRIVE

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan kerjasama dari semua pihak yang terkait di lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Triwulan III Tahun 2023 ini dapat disusun.

Laporan Kinerja (LKj) Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Triwulan III Tahun 2023 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Triwulan III Tahun 2023 yang tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian Perikanan Budidaya. LKj Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Triwulan III Tahun 2023 ini mencakup Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok menyesuaikan dengan DJPB KKP berikut pencapaian IKU melalui serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2023 oleh masing-masing kelompok kerja yang ada di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.

LKj Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Triwulan III Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal, LKj Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Triwulan III Tahun 2023 dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sehingga dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja organisasi dengan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui pelayanan yang lebih profesional dan transparan yang berguna bagi masyarakat.

Semoga laporan ini bermanfaat dan berguna untuk menunjang pembangunan perikanan budidaya di masa mendatang.

Lombok Barat, 20 Oktober 2023

**Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut
Lombok**



Samsul Bahrawi, S.St.Pi., M.Sc

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	8
BAB 1. PENDAHULUAN... ..	12
1.1.LATAR BELAKANG	12
1.2.MAKSUD DAN TUJUAN	12
1.3.TUGAS DAN FUNGSI.....	12
1.4.ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA	15
1.5.SISTEMATIKA LKJ.....	16
BAB 2.PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	18
2.1.RENCANA STRATEGIS BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK TAHUN 2020-2024	18
2.1.1.VISI.....	8
2.1.2.MISI.....	18
2.1.3.TUJUAN.....	18
2.1.4.SASARAN KEGIATAN	19
2.1.5.STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	20
2.2. RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN.....	22
2.3.PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	23
2.4.PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023	24
BAB 3.AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1.CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	26
3.2.ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	32
3.3.CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	82
3.4.EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	83
BAB 4.PENUTUP.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Triwulan III Tahun 2023.....	30
2. Nilai PNPB BPBL Lombok.....	36
Tabel 3. Penyaluran bantuan KBRL Triwulan III Tahun 2023.....	37
Tabel 4. Capaian bantuan sarana KBRL.....	38
Tabel 6. Bantuan benih yang didistribusikan ke masyarakat	39
Tabel 7. Persentase Bantuan Benih yang Disalurkan	45
Tabel 10. Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan	46
Tabel 12. Persentase calon induk unggul yang diproduksi.....	47
Tabel 13. Persentase Calon Induk Unggul yang Diproduksi	48
Tabel 14. perbandingan prosentase capaian calon induk unggul ikan laut yang diproduksi	48
Tabel 15. Persentase Keberhasilan Pengembangan Benih pada Komoditas Lobster	49
Tabel 16. Persentase Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan Skala Intermediate yang Diproduksi.....	51
Tabel 17. Capaian Persentase Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan Skala Intermediate yang Diproduksi ...	51
Tabel 18. perbandingan prosentase capaian Produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate	52
Tabel 19. Persentase Sarana dan Prasarana Bioflok yang Disalurkan	53
Tabel 18. perbandingan prosentase sarana dan prasarana bioflok yang disalurkan	54
Tabel 20. Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan.....	55
Tabel 21. perbandingan prosentase Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan	56
Tabel 22. Persentase Model Usaha Pembesaran Budidaya Lobster yang Dikembangkan	57
Tabel 23. Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Hias yang Disalurkan.....	59
Tabel 21. perbandingan Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Hias yang Disalurkan.....	60
Tabel 24. Realisasi Jumlah sampel yang diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan.....	61
Tabel 25. Persentase sampel kesehatan ikan dan lingkungan yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium.....	62
Tabel 26. Perbandingan Persentase Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan yang Diuji	62
Tabel 27. Realisasi Jumlah sampel AMR	63
Tabel 28. Persentase sampel antimikrobal resistance (AMR) yang diuji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	64
Tabel 29. Perbandingan prosentase capaian jumlah sampel AMR UPT Laut	65
Tabel 30. Indeks profesionalitas ASN lingkup satker BPBL Lombok	66
Tabel 31. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.....	67
Tabel 32. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBL Lombok	69
Tabel 33. Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPBL Lombok	70
Tabel 34. Perbandingan prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan	71
Tabel 35. Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup satker BPBL Lombok.....	72
Tabel 38. Nilai IKPA Satker BPBL Lombok	73
Tabel 40. Nilai Kinerja Anggaran BPBL Lombok	74

Tabel 41. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok	76
Tabel 42. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPBL Lombok.....	77
Tabel 43. Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi.....	79
Tabel 44. Indeks Pengelolaan kepegawaian	80
Tabel 45. Nilai Pengawasan Kearsipan.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Perikanan Budidaya Laut Tahun 2023	13
Gambar 2. Grafik jumlah pegawai BPBL Lombok berdasarkan jabatan per September 2023.....	13
Gambar 3. Grafik jumlah pegawai BPBL Lombok berdasarkan tingkat pendidikan per September 2023. 14	
Gambar 4. Grafik jumlah pegawai BPBL Lombok berdasarkan pangkat/gol per September 2023	14
5. Perjanjian kinerja Tahun 2023 sebelum perubahan kepala Balai	23
Gambar 6. Perjanjian kinerja Tahun 2023 setelah perubahan kepala Balai	24
Gambar 7. Screenshot aplikasi Kinerjaku.....	29
8. Realisasi PNBK Tahun 2023.....	35
Gambar 9. Dokumentasi Penyerahan bantuan sarana KBRL ke masyarakat	37
Gambar 10. Dokumentasi penyerahan bantuan Benih Ikan Laut yang disalurkan ke masyarakat.....	44
Gambar 11 Dokumentasi kegiatan produksi calon induk unggul.....	47
Gambar 12. Pemeliharaan mikropropagul menjadi thalus muda	51
Gambar 13. Kegiatan penyerahan bantuan sarana dan prasarana ikan hias	59
Gambar 14. Kegiatan akreditasi laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.....	61
Gambar 15. Kegiatan pengambilan sampel AMR.....	64
Gambar 16. Dokumen pelaksanaan lelang	77
Gambar 17. Pengisian data pada aplikasi KUSUKA	78
Gambar 18. Capaian Kinerja Anggaran berdasarkan aplikasi OM SPAN	82
Gambar 19. Hasil efisiensi berdasarkan aplikasi SMART DJA.....	83

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKJ) ini merupakan bentuk pertanggung jawaban atas perjanjian kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok yang memuat rencana, capaian dan realisasi anggaran dan kegiatan BPBL Lombok pada Triwulan III Tahun 2023. Berdasarkan Surat Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (BPBL Lombok) dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2023 dan kemudian dilakukan perubahan terakhir pada bulan September 2023, maka telah ditetapkan target kinerja yang harus dicapai oleh satker BPBL Lombok terdiri dari 4 (empat) Sasaran Kegiatan dengan 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Ringkasan penjelasan pencapaian IKU dalam setiap Sasaran Strategis sebagaimana berikut :

Sasaran Kegiatan 1, yaitu : “Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat pada Wilayah kerja BPBL Lombok ” didukung oleh 1 (satu) IKU yaitu : (i) Nilai PNBPN yang diperoleh

Sasaran Kegiatan 2, yaitu : “Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan” didukung oleh 10 (sepuluh) IKU, yaitu : (i) Persentase bantuan sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang disalurkan (ii) Persentase bantuan benih yang disalurkan (iii) Persentase bantuan calon induk yang disalurkan (iv) Persentase calon induk unggul yang diproduksi (v) Persentase Keberhasilan Pengembangan Benih pada Komoditas Lobster (vi) Persentase bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate yang diproduksi (vii) Persentase sarana dan prasarana bioflok yang disalurkan (viii) Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan (ix) Persentase Model Usaha Pembesaran Budidaya Lobster yang Dikembangkan (x) Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Hias yang disalurkan

Sasaran Kegiatan 3, yaitu : “Meningkatnya kualitas pengendalian Kesehatan ikan” didukung oleh 2 (dua) IKU yaitu: (i) Persentase Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan yang Diuji; (ii) Persentase Pengujian Antimikrobia Resistance (AMR)

Sasaran Kegiatan 4, yaitu : “Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok” didukung oleh 12 (dua belas) IKU yaitu (i) Indeks profesionalitas ASN lingkup BPBL Lombok; (ii) Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi ; (iii) Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa

Keuangan Satker BPBL Lombok ; (iv) Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPBL Lombok ; (v) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPBL Lombok ; (vi) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPBL Lombok (Nilai); (vii) Nilai Kinerja Anggaran BPBL Lombok ; (viii) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok , (ix) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPBL Lombok , (x) Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA , (xi) Indeks Pengelolaan Kepegawaian, (xii) Nilai Pengawasan Kearsipan BPBL Lombok

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2023, dari 25 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 5 (Lima) Indikator kinerja yang mencapai target yang telah ditentukan pada Triwulan III Tahun 2023, yaitu :

1. Persentase Calon Induk Unggul yang Diproduksi sebesar 60,07% dari target 50%;
2. Persentase Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan Skala Intermediate yang Diproduksi sebesar 84,40 % dari target 75%
3. Persentase Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan yang Diuji sebesar 161,75% dari target 75%;
4. Persentase Pengujian Antimikrobal Resistance (AMR) sebesar 82,35% dari target 75%;
5. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPBL Lombok sebesar 93,33% dari target 75%;

Sementara terdapat 19 (Sembilan belas) indikator yang belum bisa dihitung pada Triwulan II Tahun 2023, yaitu :

1. Persentase bantuan sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang disalurkan;
2. Persentase bantuan benih yang disalurkan;
3. Persentase bantuan calon induk yang disalurkan;
4. Persentase Keberhasilan Pengembangan Benih pada Komoditas Lobster;
5. Persentase sarana dan prasarana bioflok yang disalurkan
6. Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan;
7. Persentase Model Usaha Pembesaran Budidaya Lobster yang Dikembangkan;
8. Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Hias yang disalurkan
9. Indeks profesionalitas ASN lingkup BPBL Lombok;
10. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi ;

11. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBL Lombok ;
12. Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPBL Lombok;
13. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPBL Lombok (Nilai);
14. Nilai Kinerja Anggaran BPBL Lombok ;
15. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok;
16. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPBL Lombok ;
17. Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA;
18. Indeks Pengelolaan Kepegawaian;
19. Nilai Pengawasan Kearsipan BPBL Lombok

Sedangkan 1 (Satu) indikator yang tidak tercapai pada Triwulan III Tahun 2023, yaitu :

1. Nilai PNBP BPBL Lombok sebesar Rp.522.106.939 dari target Rp 550.000.000 ;

Berdasarkan Hasil evaluasi kinerja Triwulan III Tahun 2023, dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) indikator yang tidak tercapai pada Triwulan III Tahun 2023, yaitu Nilai PNBP BPBL Lombok.

Beberapa langkah rekomendasi yang dapat dilakukan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah :

1. Mengoptimalkan produksi lobster untuk mendongkrak nilai PNBP;
2. Meningkatkan pelayanan dan fasilitas asrama sehingga mampu menambah jumlah *stakeholder* pengguna asrama setiap tahunnya.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri KP No. 67/MEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya mempunyai tugas yaitu melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, bimbingan teknis, dan pengelolaan sistem informasi di bidang perikanan budidaya laut, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan guna mendukung berbagai program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan.

Berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun rencana kerja tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

Atas dasar hal-hal tersebut, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sebagai salah satu UPT Ditjen Perikanan Budidaya telah melakukan penyusunan target kinerja Tahun 2023, dan dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai sampai dengan Triwulan III Tahun 2023, dan kemudian dituangkan dalam LKj Triwulan III Tahun 2023. LKj BPBL Lombok ini menginformasikan *input, output, outcome, dan benefit* dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu Triwulan III Tahun 2023.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Penyusunan LKj BPBL Lombok Triwulan III Tahun 2023 yaitu : (i) sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi BPBL Lombok kepada seluruh *stakeholders*; (ii) sebagai sarana monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja BPBL Lombok Triwulan III Tahun 2023; dan (iii) sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

1.3. Tugas dan Fungsi

BPBL Lombok bertugas melaksanakan uji terap teknik dan kerjasama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan serta bimbingan teknis perikanan budidaya laut, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor Nomor 32 Tahun 2021 tentang

perubahan atas Peraturan Menteri KP No. 67/MEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya yang diuraikan lebih rinci dalam fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang perikanan budidaya laut;
2. pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya laut;
3. pelaksanaan penyiapan bahan standarisasi perikanan budidaya laut;
4. pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya laut;
5. pelaksanaan kerja sama teknis perikanan budidaya laut;
6. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budidaya laut;
7. pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya laut;
8. pelaksanaan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya laut;
9. pelaksanaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budidaya laut;
10. pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya laut; dan
11. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, berdasarkan peraturan menteri tersebut, susunan organisasi BPBL Lombok terdiri dari :

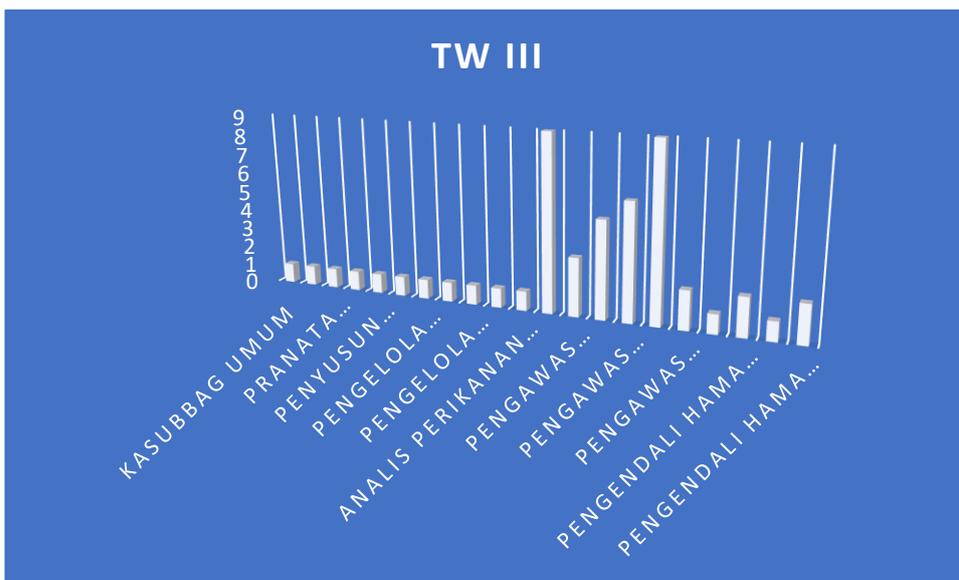
1. Subbagian Umum, yang mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.
2. Kelompok jabatan fungsional, yang mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Susunan organisasi BPBL Lombok tergambar pada susunan organisasi di bawah ini :

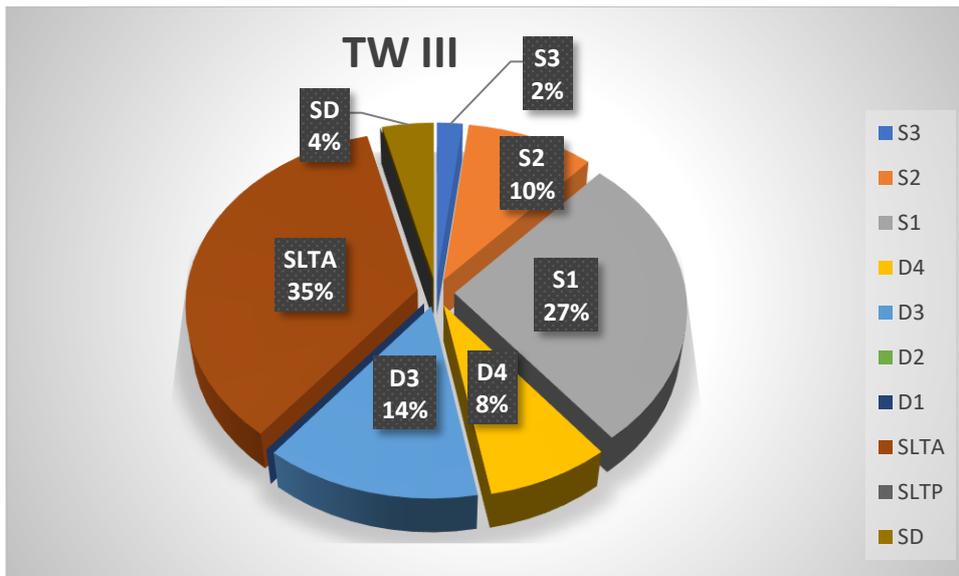


Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Perikanan Budidaya Laut Tahun 2023

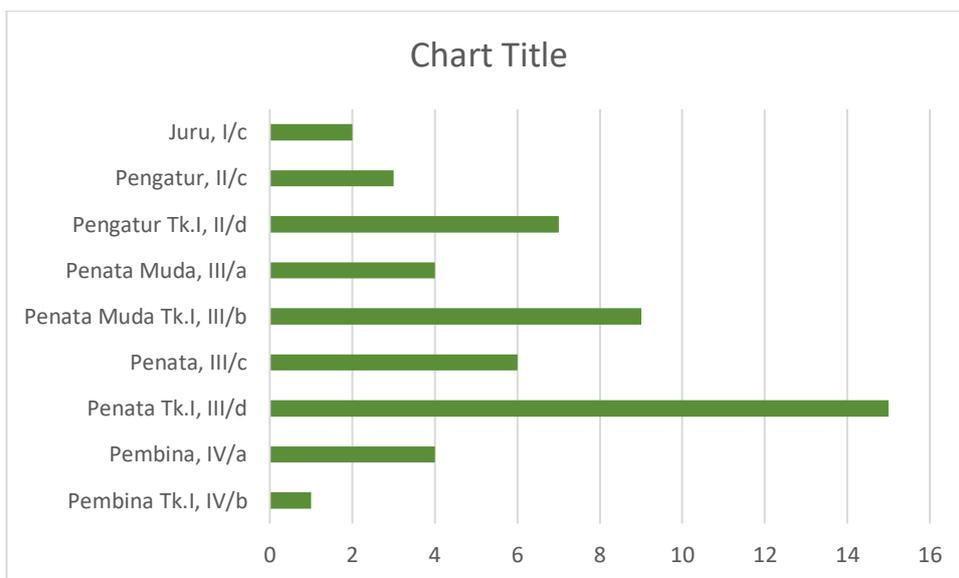
Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok didukung oleh SDM sejumlah 75 orang dengan rincian sejumlah 51 orang ASN dan 24 orang tenaga kontrak dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 2. Grafik jumlah pegawai BPBL Lombok berdasarkan jabatan per September 2023



Gambar 3. Grafik jumlah pegawai BPBL Lombok berdasarkan tingkat pendidikan per September 2023



Gambar 4. Grafik jumlah pegawai BPBL Lombok berdasarkan pangkat/gol per September 2023

1.4. Isu Strategis (*Strategic Issued*) dan Permasalahan Utama

1.4.1. Isu Strategis Pengembangan Budidaya Laut

Budidaya laut (*Marine Culture*) di Indonesia merupakan bagian dari sektor kelautan dan perikanan yang mempunyai kontribusi penting dalam memenuhi target produksi perikanan. Potensi sumber daya perikanan budidaya laut khususnya di Propinsi NTB dimanfaatkan untuk kegiatan pengembangan komoditas-komoditas yang memiliki nilai ekonomis penting, diantaranya: rumput laut, mutiara, lobster, kerapu, kakap dan bawal bintang (Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi NTB). Lebih lanjut lagi data statistik perikanan budidaya di

Propinsi NTB diketahui pada tahun 2021, potensi areal budidaya laut seluas 171.010,51 hektar dengan jumlah Rumah Tangga Produksi berjumlah 10.033 unit.

Dalam pengembangan budidaya laut di wilayah tengah dan timur Indonesia (Bali, NTT, dan Papua) khususnya di propinsi NTB yang menjadi wilayah kerja BPBL Lombok terdapat beberapa isu dan permasalahan yang dihadapi, antara lain: (i) harga pakan untuk komoditas ikan laut sangatlah tinggi (pakan segar dan pakan buatan); (ii) penyakit; (iii) akses permodalan yang terbatas karna ketidak stabilan produksi dan resiko kegagalan yang tinggi; (iv) standar kompetensi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih perlu ditingkatkan; (v) tingkat kelulushidupan (SR) biota yang dipelihara saat panen yang masih rendah karena berbagai macam faktor mulai dari lingkungan budidaya, tidak konsistennya penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) hingga kualitas benih yang masih rendah dari segi pertumbuhan.

Selain permasalahan tersebut diatas juga terdapat beberapa tantangan yang dihadapi BPBL Lombok dalam pengembangan budidaya ikan air laut, diantaranya: (i) pengembangan teknologi budidaya dari jenis kekerangan, ikan bersirip dan juga lobster yang bernilai ekonomis tinggi belum optimal dilakukan; (ii) keterbatasan sarana prasarana, anggaran, dan SDM; dan (iii) wilayah kerja yang sangat luas.

1.4.2. Permasalahan Utama Pencapaian Indikator Kinerja Utama di BPBL Lombok

Secara umum, permasalahan-permasalahan/ kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian semua program prioritas pada Triwulan III Tahun 2023 di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, diantaranya :

1. Adanya kepindahan kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sehingga memerlukan waktu untuk melakukan penggantian akun di beberapa aplikasi yang ada.
2. Perubahan tim kerja setelah dilakukan evaluasi oleh KemenPAN-RB.
3. Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok mendapat arahan untuk menyalurkan bantuan bioflok tahap II sebanyak 45 paket.

1.5. Sistematika LKj

LKj ini secara umum memuat target dan capaian kinerja Balai Perikanan Budiaya Laut Triwulan III Tahun 2023 . LKj ini menginformasikan perbandingan antara target dan capaian kinerja (*performance results*) Triwulan III Tahun 2023 dengan target dan kinerja pada tahun sebelumnya. Dari analisa tersebut akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*Performance gap*) sehingga dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Adapun sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja BPBL Lombok Triwulan III Tahun 2023 , permasalahan yang dihadapi, dan upaya mengatasi hal tersebut.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang BPBL Lombok serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi BPBL Lombok, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKj.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini disajikan tapja yang memuat sasaran kegiatan berikut indikator kinerja utama (IKU) pada Triwulan III Tahun 2023 .
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini disajikan rincian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBL Lombok serta evaluasi dan analisis kinerja. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang efisiensi.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama.

BAB 2. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK TAHUN 2020 – 2024

2.1.1. Visi

Visi Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sejalan dengan visi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yaitu : “Terwujudnya masyarakat perikanan budidaya yang sejahtera dan sumber daya perikanan budidaya yang berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

2.1.2. Misi

Misi yang akan dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sejalan dengan misi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yaitu :

1. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan budidaya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional.
2. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja DJPB di pusat dan daerah.

2.1.3. Tujuan

Tujuan pembangunan perikanan budidaya yaitu :

1. Peningkatan kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan budidaya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional:
 - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya;
 - b. Mengoptimalkan pengelolaan kawasan perikanan budidaya secara berkelanjutan;dan
2. Meningkatkan produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan.
3. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di UPT BPBL Lombok, yakni meningkatkan kinerja reformasi birokrasi sebagai UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

2.1.4. Sasaran Kegiatan

Tujuan strategis pembangunan perikanan budidaya laut akan dicapai melalui sejumlah sasaran kegiatan yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada Triwulan III Tahun 2023 .

Sasaran Kegiatan pembangunan perikanan budidaya berdasarkan tujuan yang akan dicapai dijabarkan dalam lima perspektif dengan masing-masing IKU sebagai berikut :

1. Ekonomi sektor budidaya meningkat pada Wilayah Kerja BPBL Lombok dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran kegiatan ini adalah Nilai PNBPN yang diperoleh
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran kegiatan ini adalah :
 - a. Persentase bantuan sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang disalurkan;
 - b. Persentase bantuan benih yang disalurkan;
 - c. Persentase bantuan calon induk yang disalurkan;
 - d. Persentase calon induk unggul yang diproduksi;
 - e. Persentase Keberhasilan Pengembangan Benih pada Komoditas Lobster;
 - f. Persentase bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate yang diproduksi;
 - g. Persentase sarana dan prasarana bioflok yang disalurkan;
 - h. Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan;
 - i. Persentase Model Usaha Pembesaran Budidaya Lobster yang Dikembangkan;
 - j. Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Hias yang disalurkan
3. Meningkatnya kualitas pengendalian Kesehatan ikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran kegiatan ini adalah :
 - a. Persentase Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan yang Diuji;
 - b. Persentase Pengujian Antimikrobia Resistance (AMR).
4. Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran kegiatan ini adalah :
 - a. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup BPBL Lombok
 - b. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;

- c. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBL Lombok Nilai rekon kinerja BPBL lombok
- d. Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPBL Lombok
- e. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPBL Lombok ;
- f. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPBL Lombok ;
- g. Nilai Kinerja Anggaran BPBL Lombok,
- h. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok ;
- i. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPBL Lombok ;
- j. Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA;
- k. Indeks Pengelolaan Kepegawaian ;
- l. Nilai Pengawasan Kearsipan BPBL Lombok.

2.1.5. Strategi dan Kebijakan

Strategi BPBL Lombok untuk berkontribusi langsung mengambil bagian untuk mewujudkan arah kebijakan pembangunan perikanan budidaya Tahun 2020-2024 adalah dengan mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas DJPB sebagai berikut :

a. Aspek sosial ekonomi:

Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya, dilaksanakan dengan komponen kegiatan prioritas sebagai berikut:

- Penyaluran bantuan induk unggul dan benih bermutu kepada kelompok pembudidaya untuk menghidupkan kembali usaha budidaya skala kecil, serta mengoptimalkan fungsi UPT dan UPTD serta unit pembenihan masyarakat untuk membantu kontinuitas usaha kelompok penerima bantuan tersebut;
- Penyaluran bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok pembudidaya, antara lain bibit/benih, pakan, obat ikan dan vitamin, pupuk serta peralatan, sebagai upaya stimulasi pengembangan usaha pembudidayaan ikan;
- Pengembangan kebun bibit rumput laut melalui pemberian bantuan bibit bermutu di kawasan sentra kebun bibit rumput laut.

b. Aspek teknologi produksi:

Meningkatkan produktivitas, daya saing ekonomi serta pemanfaatan

potensi sumberdaya perikanan budidaya, dilaksanakan dengan komponen kegiatan prioritas sebagai berikut:

- Pengembangan kawasan perikanan budidaya (minapolitan) dengan mengintegrasikan rantai produksi dari hulu sampai hilir untuk efisiensi produksi;
- Peningkatan kualitas induk dan benih melalui sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) untuk menghasilkan unit pembenihan bersertifikat;
- Pelaksanaan sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) untuk menghasilkan pembudidaya (pembesaran ikan) bersertifikat;
- Pengembangan Kebun Bibit Rumput Laut dengan sistem Kultur Jaringan
- Peningkatan kuantitas dan kualitas ikan non konsumsi (ikan hias, karang buatan, tanaman hias dll);
- Pengembangan sentra budidaya baru berbasis kawasan/klaster, dimana salah satu gebrakan KKP adalah pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di pulau-pulau terluar Indonesia. Dalam hal ini, Ditjen Perikanan Budidaya ditugaskan untuk mengawal 3 kawasan SKPT, yaitu Sabang, Rote Ndao, dan Sumba Timur.
- Pelaksanaan budidaya lele sistem bioflok, yaitu teknologi budidaya lele intensif dengan mengandalkan suplai oksigen dan gumpalan (flok) mikroorganisme tertentu. Untuk tahap awal, fokus kegiatan bioflok dilakukan di pesantren, untuk kemudian diperluas ke wilayah lain. Tujuan bioflok adalah meningkatkan ketahanan pangan, memenuhi gizi protein santri, meningkatkan konsumsi makan ikan masyarakat, meningkatkan pendapatan serta perekonomian pesantren dan masyarakat
- Pengembangan sarana input produksi inovatif di UPT Pusat, misalnya protein rekombinan, vaksin, enzim, probiotik, immunostimulan, rekayasa genetik, automatic feeder, karamba bulat, dll.

c. Aspek sumber daya alam dan lingkungan:

Mewujudkan kelestarian dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya, dilaksanakan dengan komponen kegiatan prioritas sebagai berikut:

- Penerapan perekayasa teknologi budidaya yang efisien dan ramah lingkungan dan sesuai dengan daya dukung;
- Pengembangan Culture Based Fisheries (CBF) dengan pendekatan komoditas multitrophic level.

- Pengembangan komoditas ikan spesifik lokal unggulan dan species ikan tahan perubahan lingkungan;
- Pengendalian plasma nutfah induk dan benih;

2.2. RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN

Pelaksanaan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok pada Triwulan III Tahun 2023 difokuskan pada program pencapaian Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Pengelolaan perbenihan ikan
2. Pengelolaan kawasan dan kesehatan ikan
3. Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan
4. Dukungan manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

Dimana dalam mencapai hal tersebut, telah didistribusikan melalui Klasifikasi Rincian Output yaitu : (i) Bantuan peralatan/sarana; (iii) Bantuan hewan; (iv) Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan ; (v) Penyidikan dan Pengujian Penyakit; (vi) Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan; (vii) Sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi; (viii) Layanan dukungan manajemen internal; (ix) layanan manajemen SDM internal; (x) layanan manajemen kinerja internal.

Dalam mendukung rencana kerja tersebut, BPBL Lombok mendapatkan pagu anggaran berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 sebesar **Rp. 25.088.141,000- (Dua Puluh Lima Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)**. Berikut adalah nilai pagu berdasarkan kegiatan :

- a. Pengelolaan perbenihan ikan sebesar Rp. 5.910.866.000
- b. Pengelolaan kawasan dan kesehatan ikan sebesar Rp. 622.718.000
- c. Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan sebesar Rp. 7.315.000.000
- d. Dukungan manajemen internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp. 11.239.557.000

Namun dengan adanya beberapa perubahan, maka nilai pagu anggaran berubah menjadi **Rp 34.071.515.000- (Tiga Puluh Empat Miliar Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)**. Berikut adalah nilai pagu berdasarkan kegiatan :

- e. Pengelolaan perbenihan ikan sebesar Rp. 5.367.755.000
- f. Pengelolaan kawasan dan kesehatan ikan sebesar Rp. 503.303.000

- g. Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan sebesar Rp. 17.045.000.000
h. Dukungan manajemen internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya sebesar
Rp. 11.155.457.000

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, penetapan kinerja BPBL Lombok tahun 2023. Berikut adalah perjanjian kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sebelum dan sesudah perubahan kepala Balai dan perubahan Indikator Kinerja Tahun 2023 .



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4120 JKP-10681
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMPAU: www.kem-pf.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yayan Sofyan**
Jabatan : Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan
Budidaya Laut Lombok

Yayan Sofyan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
SK 1 Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya meningkat di Wilayah Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	1 Nilai PNBP Saban Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (Rp)	762.305.000
SK 2 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	2 Persentase bantuan sarana Kebun Bibit Rumpul Laut (KBRL) yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	75
	3 Persentase bantuan benih yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	100
	4 Persentase bantuan calon induk yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	100
	5 Produksi calon induk unggul di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (ekor)	1.400
	6 Persentase keberhasilan teknologi komoditas unggulan yang dikembangkan lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	100
	7 Produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate di UPT lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (plantlet)	3.000
	8 Persentase sarana dan prasarana bioflok yang disalurkan ke masyarakat (%)	100
	9 Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat (%)	100
	10 Prosentase Model Usaha Budidaya Komoditas Unggulan yang Dikembangkan oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	100
	11 Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias yang disalurkan ke masyarakat (%)	100

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
SK 3 Meningkatkan kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya bidang kawasan dan kesehatan ikan	12 Persentase sampel Kesehatan ikan dan Lingkungan yang diuji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	100
	13 Persentase sampel antimikrobal resistance (AMR) yang diuji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	100
SK 4 Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	14 Indeks profesionalitas ASN lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	81
	15 Hasil penilaian pembangunan ZI menuju WBK di Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	78
	16 Prosentase penyelesaian LHP BPK atau Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	100
	17 Nilai REKON SAKIP Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	93
	18 Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimantapkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	75
	19 Prosentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	92
	20 Nilai IKPA Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	89
	21 NKA Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	82
	22 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	77,5
	23 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	77,5
	24 Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan data KUSUKA (%)	80
	25 Indeks pengelolaan kepegawaian	3
	26 Nilai Pengawasan kearsipan	75

NO.	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Pengelolaan Perbenihan Ikan	5.910.866.000
2	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	622.718.000
3	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	7.315.000.000
4	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	11.239.557.000
Total Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Tahun 2023		25.088.141.000

Jakarta, 30 Januari 2023

Pihak Kedua Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	Pihak Pertama Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
 Tb. Haeru Rahayu	 Yayan Solyan

Gambar 5. Perjanjian kinerja Tahun 2023 sebelum perubahan kepala Balai

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Tahun 2023 BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK

LKj
Triwulan III Tahun 2023



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
JULIAN MEDAN BERENDAS TAMAN KEMAS 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130, KP 10041
TELEFON (21) 5919701-10041, FAKS (21) 5914772
LAMARAN 356.92.01 SURBEL.02010303@kcp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BALAI PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LOMBOK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akurat dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Samsul Bahrawi**
Jabatan : **Pt. Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : **Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, September 2023

Pihak Kedua : **Tb. Haeru Rahayu**
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama : **Samsul Bahrawi**
Pt. Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok

Samsul Bahrawi

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	23. Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi Kusuka (Persen)	80
	24. Indeks Pengelolaan Kepegawaian (Indeks)	3
	25. Nilai Pengawasan Keasrian BPBL Lombok (Nilai)	75

Jakarta, September 2023

Pihak Kedua : **Tb. Haeru Rahayu**
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama : **Samsul Bahrawi**
Pt. Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok

Samsul Bahrawi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BALAI PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LOMBOK

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkat di Wilayah Kerja Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok	1. Nilai PNBP yang Diperoleh (Rupiah)	762.305.000
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	2. Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumpul Laut (KBRL) yang Disalurkan (Persen)	75
	3. Persentase Bantuan Benih yang Disalurkan (Persen)	100
	4. Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan (Persen)	100
	5. Persentase Calon Induk Ungguk yang Diproduksi (Persen)	100
	6. Persentase Keberhasilan Pengembangan Benih pada Komoditas Lobster (Persen)	100
	7. Persentase Bibit Rumpul Laut Kultur Jaringan Skala Intermediate yang Diproduksi (Persen)	100
	8. Persentase Sarana dan Prasarana Bioflok yang Disalurkan (Persen)	100
	9. Persentase Diseminasi Teknologi Pembenaran Ikan (Persen)	100
	10. Persentase Model Usaha Pembenaran Budidaya Lobster yang Dikembangkan (Persen)	100
	11. Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Hias yang Disalurkan (Persen)	100

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
3. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan	12. Persentase Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan yang Diuji (Persen)	100
	13. Persentase Pengujian Antimikrobal Resistance (AMR) (Persen)	100
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok	14. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Lombok (Indeks)	81
	15. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)	76
	16. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Sektor BPBL Lombok (Persen)	100
	17. Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPBL Lombok (Nilai)	93
	18. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPBL Lombok (Persen)	75
	19. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (LKPA) BPBL Lombok (Nilai)	89
	20. Nilai Kinerja Anggaran BPBL Lombok (Nilai)	82
	21. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok (Persen)	77,5
	22. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPBL Lombok (Persen)	77,5

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Perbenihan Ikan	5.367.755.000
2.	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	503.303.000
3.	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	17.045.000.000
4.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Dijen Perikanan Budi Daya	11.155.457.000
Total Anggaran Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok Tahun 2023		34.071.515.000

Jakarta, September 2023

Pihak Kedua : **Tb. Haeru Rahayu**
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama : **Samsul Bahrawi**
Pt. Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok

Samsul Bahrawi

Gambar 6. Perjanjian kinerja Tahun 2023 setelah perubahan kepala Balai

Adanya evaluasi kinerja berimbas juga pada perubahan target kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan BPBL Lombok sebagai berikut :

SEBELUM			SESUDAH		
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN (2023)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN (2023)
Ekonomi Sektor perikanan budidaya meningkat di wilayah kerja BPBL Lombok	Nilai PNBP Satuan Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (Rp)	762,305,000	Ekonomi Sektor perikanan budidaya meningkat di wilayah kerja BPBL Lombok	Nilai PNBP yang diperoleh (Rp)	762,305,000
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase bantuan sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	75	Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase bantuan sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang disalurkan (%)	75
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase bantuan benih yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	100	Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase bantuan benih yang disalurkan (%)	100
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase bantuan calon induk yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	100	Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan (%)	100
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Produksi calon induk unggul di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok(ekor)	1,400	Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase Calon Induk Unggul yang Diproduksi (%)	100

Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase keberhasilan teknologi komoditas unggulan yang dikembangkan lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	100	Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase Keberhasilan Pengembangan Benih pada Komoditas Lobster (%)	100
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate di UPT lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (planlet)	3,000	Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan Skala Intermediate yang Diproduksi (%)	100
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase sarana dan prasarana bioflok yang disalurkan ke masyarakat (%)	100	Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase Sarana dan Prasarana Bioflok yang Disalurkan (%)	100
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat (%)	100	Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan (%)	100
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Prosentase Model Usaha Budidaya Komoditas Unggulan yang Dikembangkan oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	100	Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase Model Usaha Pembesaran Budidaya Lobster yang Dikembangkan (%)	100
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias yang disalurkan ke masyarakat (%)	100	Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias yang disalurkan ke masyarakat (%)	100
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Dan Pengawasan Perikanan Budidaya Bidang Kawasan Dan Kesehatan Ikan	Persentase sampel Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang diuji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	100	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan	Persentase Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan yang Diuji (%)	100

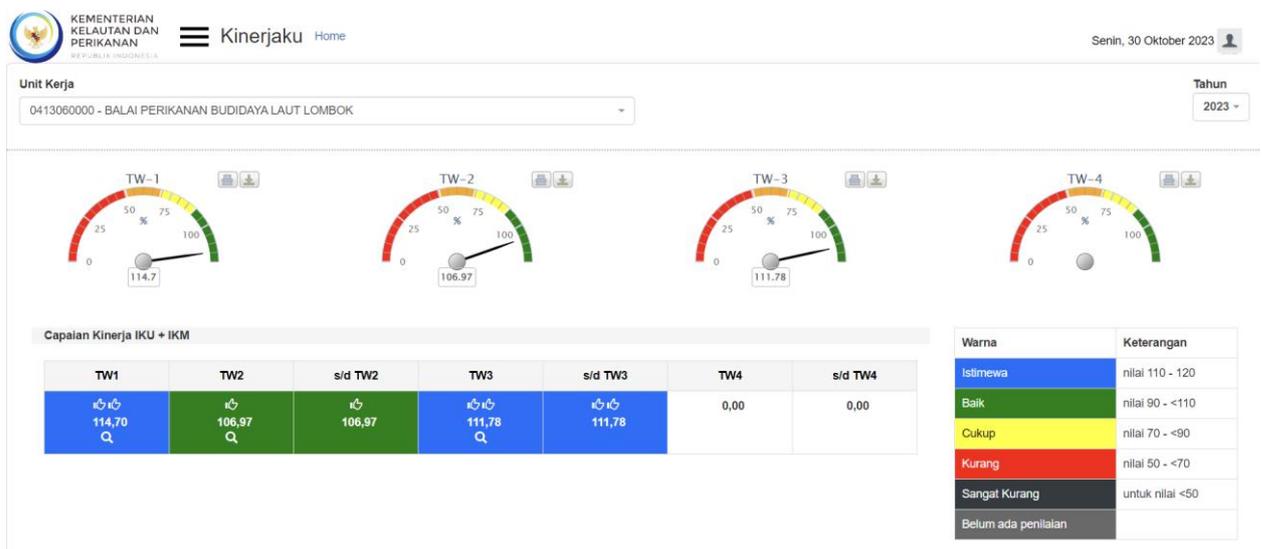
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Dan Pengawasan Perikanan Budidaya Bidang Kawasan Dan Kesehatan Ikan	Persentase sampel antimikrobia resistance (AMR) yang diuji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok(%)	100	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan	Persentase Pengujian Antimikrobia Resistance (AMR) (%)	100
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Indeks profesionalitas ASN lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	81	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Lombok (Indeks)	81
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Hasil penilaian pembangunan ZI menuju WBK di Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	76	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)	76
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Persentase penyelesaian LHP BPK atas satker BPBL Lombok (%)	100	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBL Lombok (Persen)	100
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Nilai REKON SAKIP Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	93	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPBL Lombok (Nilai)	93
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	75	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPBL Lombok (Persen)	75

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Prosentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	92			
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Nilai IKPA Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	89	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPBL Lombok (Nilai)	89
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	NKA Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	82	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok	Nilai Kinerja Anggaran BPBL Lombok (Nilai)	82
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	77.5	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok (Persen)	77.5
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	77.5	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPBL Lombok (Persen)	77.5
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan data KUSUKA (%)	80	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok	Persentase Pelaku Usaha Budi daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	80
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Indeks pengelolaan kepegawaian	3	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok	Indeks Pengelolaan Kepegawaian (Indeks)	3
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Nilai Pengawasan kearsipan	75	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok	Nilai Pengawasan Kearsipan BPBL Lombok (Nilai)	75

2.4. PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan implementasi aplikasi BSC “kinerjaku” yang merupakan Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja berbasis informasi teknologi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian nilai kinerja Pada Triwulan III Tahun 2023 ini adalah sebesar 111,78 % atau masuk dalam kategori ISTIMEWA (Biru). Berikut adalah hasil *Screenshot* dari aplikasi Kinerjaku BPBL Lombok.



Gambar 7. Screenshot aplikasi Kinerjaku

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sampai dengan Triwulan III Tahun 2023, berdasarkan sistem aplikasi Kinerjaku diperoleh nilai capaian kinerja sebesar 111,78%. Adapun rekapitulasi capaian kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok pada Triwulan III Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Triwulan III Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN (2023)	Realisasi s/d TW III		Realisasi Terhadap Target TW III (%)	Realisasi terhadap Target 2023 (%)
			Target TW III	Realisasi s/d TW III		
Ekonomi Sektor perikanan budidaya meningkat di wilayah kerja BPBL Lombok	Nilai PNPB yang diperoleh (Rp)	762,305,000	550,000,000	522,106,939	94.93	68.49
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase bantuan sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang disalurkan (%)	75	-	0.00	0.00	0.00
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase bantuan benih yang disalurkan (%)	100	0	0.00	0.00	0.00
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan (%)	100	0	0.00	0.00	0.00

Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase Calon Induk Unggul yang Diproduksi (%)	100	50	60.07	120.14	60.07
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase Keberhasilan Pengembangan Benih pada Komoditas Lobster (%)	100	-	0	0.00	0
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan Skala Intermediate yang Diproduksi (%)	100	75	84.40	112.53	84.40
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase Sarana dan Prasarana Bioflok yang Disalurkan (%)	100	-	0	0.00	0
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan (%)	100	-	0	0.00	0
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase Model Usaha Pembesaran Budidaya Lobster yang Dikembangkan (%)	100	0	0	0.00	0
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias yang disalurkan ke masyarakat (%)	100	-	0	0.00	0
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan	Persentase Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan yang Diuji (%)	100	75	161.75	215.67	161.75

Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan	Persentase Pengujian Antimikrobia Resistance (AMR) (%)	100	75	82.35	109.80	82.35
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Lombok (Indeks)	81	-	0.00	0.00	0
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)	76	-	0	0.00	0
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBL Lombok (Persen)	100	-	0	0.00	0
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPBL Lombok (Nilai)	93	-	0	0.00	0
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPBL Lombok (Persen)	75	75	93.33	124.44	124.44

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPBL Lombok (Nilai)	89	-	0.00	0.00	0
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok	Nilai Kinerja Anggaran BPBL Lombok (Nilai)	82	-	0	0.00	0
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok (Persen)	77.5	-	0	0.00	0
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPBL Lombok (Persen)	77.5	-	0	0.00	0
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok	Persentase Pelaku Usaha Budi daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	80	-	0	0.00	0
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok	Indeks Pengelolaan Kepegawaian (Indeks)	3	-	0	0.00	0
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok	Nilai Pengawasan Kearsipan BPBL Lombok (Nilai)	75	-	0	0.00	0

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 :

Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat Di Wilayah Kerja BPBL Lombok

1. Nilai PNBP yang diperoleh

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. PNBP BPBL Lombok diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2022 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana Nilai PNBP BPBL Lombok berasal dari pendapatan yang dihitung dari penerimaan umum, penerimaan fungsional, dan penerimaan lain-lain.

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan III Tahun 2023 ini adalah menginstruksikan para Ketua POKJA - produksi benih komoditas laut untuk memasarkan hasil produksi benih kepada para stakeholder yang berpotensi menyerap benih hasil produksi. Namun demikian, meski sudah dilakukan koordinasi dengan para ketua POKJA, berdasarkan Surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tanggal 10 Oktober 2023 Nomor B.7451/DJPB.1/KU.340/X/2023 perihal capaian realisasi PNBP Lingkup DJPB Triwulan III Tahun 2023, realisasi PNBP BPBL Lombok hanya tercapai sebesar Rp 522.106.939 atau 68.49% dari target TW III yaitu Rp 550.000.000. Berikut adalah gambar realisasi PNBP BPBL Lombok yang dapat dibandingkan dengan Unit pelaksana Teknis (UPT) Lingkup DJPB lainnya :

No.	KODE S/TKER	NAMA SATUAN KERJA	TARGET SESUAI PK	REALISASI S/D September 2023	% SESUAI PK	S / D BULAN
REALISASI PENDAPATAN PNBP						
1	632462	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (Pusat)	Rp	Rp 4.043.221.130		September 2023
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	Rp 54.776.010		CAPAIAN IKU
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 3.988.445.120		
2	445393	BLU Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang	Rp 1.124.725.000	Rp 3.959.034.674	352,00	September 2023
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.124.725.000	Rp 109.807.508	351,42	
	II	Pendapatan Badan Layanan Umum	Rp -	Rp 3.842.717.814		CAPAIAN IKU
	III	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 6.509.352		
3	239192	BLU Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara	Rp 4.240.598.000	Rp 2.846.577.949	67,13	September 2023
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 4.240.598.000	Rp 758.034.237	65,10	
	II	Pendapatan Badan Layanan Umum	Rp -	Rp 2.002.695.605		CAPAIAN IKU
	III	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 85.848.107		
4	238734	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi	Rp 1.266.132.000	Rp 1.554.468.129	122,77	September 2023
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.266.132.000	Rp 1.550.903.681	122,49	CAPAIAN IKU
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 3.564.448		
5	427706	Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung	Rp 1.325.270.000	Rp 1.057.890.580	79,82	September 2023
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.325.270.000	Rp 1.050.978.672	79,30	CAPAIAN IKU
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 6.911.888		
6	567350	BLU Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo	Rp 3.375.974.000	Rp 4.091.448.424	121,19	September 2023
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 3.375.974.000	Rp 1.785.016.770	120,99	CAPAIAN IKU
	II	Pendapatan Badan Layanan Umum	Rp -	Rp 2.299.476.146		
	III	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 6.955.508		
7	237657	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Jambi	Rp 1.534.500.000	Rp 1.842.112.257	120,05	September 2023
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.534.500.000	Rp 1.826.321.998	119,02	CAPAIAN IKU
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 15.790.259		
8	567680	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar	Rp 1.616.512.000	Rp 2.071.691.932	128,16	September 2023
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.616.512.000	Rp 1.852.338.832	114,59	CAPAIAN IKU
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 219.353.100		

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dihormati oleh BSR.E, BSSN

9	567385	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee	Rp 1.632.830.000	Rp 1.158.778.005	70,97	September 2023
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.632.830.000	Rp 1.156.473.022	70,83	CAPAIAN IKU
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 2.304.983		
10	567474	Balai Perikanan Budidaya Laut Batam	Rp 1.220.210.000	Rp 801.034.518	65,65	September 2023
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.220.210.000	Rp 794.925.027	65,15	CAPAIAN IKU
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 6.109.491		
11	567584	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin	Rp 1.150.000.000	Rp 957.162.616	83,23	September 2023
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.150.000.000	Rp 939.205.316	81,67	CAPAIAN IKU
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 17.957.300		
12	538911	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu	Rp 1.143.800.000	Rp 1.147.642.326	100,34	September 2023
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.143.800.000	Rp 993.671.258	86,87	CAPAIAN IKU
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 153.971.068		
13	567720	Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Rp 940.200.000	Rp 846.757.964	90,06	September 2023
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 940.200.000	Rp 830.434.764	88,33	CAPAIAN IKU
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 16.323.200		
14	567762	Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Rp 762.305.000	Rp 533.696.408	70,01	September 2023
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 762.305.000	Rp 522.106.939	68,49	CAPAIAN IKU
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 11.589.469		
15	567800	Balai Pengujian Keselamatan Ikan dan Lingkungan Serang	Rp 550.000.000	Rp 969.877.499	176,34	September 2023
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp -	Rp 984.830		CAPAIAN IKU
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 969.877.499		
16	445394	Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem	Rp 706.750.000	Rp 673.957.441	95,36	September 2023
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 706.750.000	Rp 655.372.200	92,73	CAPAIAN IKU
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 18.585.241		
		JUMLAH PENDAPATAN FUNGSIONAL + UMUM (I)	Rp 22.589.806.000	Rp 17.635.260.503	114,12	CAPAIAN IKU
		JUMLAH PENDAPATAN BLU (II)	Rp -	Rp 8.144.889.565		
		JUMLAH NON ANGGARAN (III)	Rp -	Rp 4.561.203.364		
		JUMLAH PENDAPATAN I + II + III	Rp 22.589.806.000	Rp 28.556.336.662	126,41	

Gambar 8. Realisasi PNBP Tahun 2023

Capaian PNBP BPBL Lombok pada Tahun 2023 ini turun sebesar 27,37% dari capaian PNBP Tahun 2022, adapun tampilan secara singkat atas capaian PNBP adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Nilai PNBP BPBL Lombok

Nama SK :Ekonomi sektor perikanan budidaya BPBL Lombok meningkat di wilayah kerja BPBL Lombok								
Nama Indikator : Nilai PNBP yang diperoleh								
Triwulan III Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2023 thd Triwulan III Tahun 2022 (%)	Target 2023	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	RENSTRA 2020-2024	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III Tahun 2022				Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra
550,000,000	522,106,939	94.93%	624,207,450	-16.36	762,305,000	68.49%	830,000,000	62.90

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini dan Pada Triwulan III Tahun 2023 terdapat permasalahan yaitu adanya penurunan permintaan pasar terhadap benih dan juga ikan konsumsi.

Tindak lanjut ke depannya dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah mengoptimalkan produksi lobster untuk mendongkrak nilai PNBP;

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 :

Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan

2. Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang Disalurkan

Kebun Bibit Rumput Laut yang disalurkan ke masyarakat berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya nomor 295 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya TA 2023 merupakan bantuan pemerintah berupa barang yaitu sarana dan prasarana KBRL dengan metode :

- 1) Longline;
 - 2) Rakit apung; dan
 - 3) Lepas dasar.
3. Rincian Sarana Bantuan.

Pada Triwulan sebelumnya permasalahan yang dihadapi adalah proses penyaluran bantuan KBRL di prov NTT belum bisa dilaksanakan karena kegiatan Cek Penerima dan Cek Lokasi untuk 8 (delapan) kelompok di NTT tersebut baru dilaksanakan pada akhir mei.

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan III Tahun 2023 ini adalah menyalurkan bantuan KBRL sebanyak 5 paket ke wilayah Bali dan NTT, namun masih ada 2 paket lagi yang

belum terealisasi dimana baru dapat terealisasikan pada Triwulan IV. Berikut adalah tabel penyaluran bantuan sarana KBRL dan dokumentasi penyerahan bantuan KBRL:

Tabel 3. Penyaluran bantuan KBRL Triwulan III Tahun 2023

NO	LOKASI PENERIMA			KOMODITAS	METODE BUDIDAYA	VOLUME	SATUAN VOLUME	PENERIMA BANTUAN		SK PENETAPAN PENERIMA (NOMOR DAN TANGGAL)	NOMOR BAST	TANGGAL BAST
	PROVINSI	KAB/KOTA	KECAMATAN/DESA					NAMA KELOMPOK	KETUA KELOMPOK			
	(1)	(2)	(3)					(10)	(11)			
1	NUSA TENGGARA BARAT	KAB.BIMA	Langgudu / Waworada	Sakul	Sistem Longline	1	Paket	Berkah laut	Rudirman	B.744/BPBL-L/PB.150-KBRL/III/2023 tanggal 13 Maret 2023	B.1532/BPBL-L/PB.150/KBRL/VI/2023	26 Juni 2023
2	NUSA TENGGARA BARAT	KAB.BIMA	Langgudu / Rupe	Sakul	Sistem Longline	1	Paket	So Soro	Ajidin		B.1533/BPBL-L/PB.150/KBRL/VI/2023	26 Juni 2023
3	NUSA TENGGARA BARAT	Sumbawa	Tarano / Labuan Aji	Sakul	Sistem Longline	1	Paket	Sumber Laut	Khairuddin		B.1535/BPBL-L/PB.150/KBRL/VI/2023	26 Juni 2023
4	NUSA TENGGARA BARAT	Sumbawa	Tarano / Labuan Bontong	Cottonii coklat lokal	Sistem Longline	1	Paket	Pasir Putih	Sapriadi		B.1534/BPBL-L/PB.150/KBRL/VI/2023	26 Juni 2023
5	NUSA TENGGARA BARAT	Dompu	Mangelewa / Kwangko	Cottonii Coklat Lokal	Sistem Longline	1	Paket	Bajo Pesisir	Gunawan		B.1531/BPBL-L/PB.150/KBRL/VI/2023	26 Juni 2023
6	BALI	Klungkung	Nusa Penida / Ceningan	Sakul	Sistem Patok	1	Paket	Segara Mekar Sari	I Ketut Sumertayana	B.602/BPBL-L/PB.150-KBRL/II/2023 tanggal 28 Februari 2023	B.1667/BPBL-L/PB.150/KBRL/VII/2023	10 Juli 2023
7	BALI	Klungkung	Nusa Penida / Ceningan	Sakul	Sistem Patok	1	Paket	Anggrek Sari Segara	I Ketut Mara		B.1668/BPBL-L/PB.150/KBRL/VII/2023	10 Juli 2023
8	NUSA TENGGARA TIMUR	Rote Ndao	Rote Barat Daya / Oeseli	Sakul	Sistem Patok	1	Paket	Batudanda	Welhelmince Messakh	B.1319/BPBL-L/PB.150-KBRL/II/2023 tanggal 5 Juni 2023	B.2347/BPBL-L/PB.150/KBRL/IX/2023	27 September 2023
9	NUSA TENGGARA TIMUR	Rote Ndao	Rote Barat Daya / Oeseli	Sakul	Sistem Patok	1	Paket	Telaga	Jusuf Longgo		B.2349/BPBL-L/PB.150/KBRL/IX/2023	27 September 2023
10	NUSA TENGGARA TIMUR	Rote Ndao	Rote Barat Daya / Oeseli	Sakul	Sistem Patok	1	Paket	Ngegeondean	David Littik		B.2351/BPBL-L/PB.150/KBRL/IX/2023	27 September 2023



Gambar 9. Dokumentasi Penyerahan bantuan sarana KBRL ke masyarakat

Capaian bantuan sarana KBRL pada Triwulan III Tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan capaian bantuan sarana KBRL Triwulan III Tahun 2022 karena pada Triwulan III Tahun

2023 belum dilakukan perhitungan. adapun tampilan secara singkat atas capaian bantuan sarana KBRL Triwulan III Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Capaian bantuan sarana KBRL

Nama SK : Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan									
Nama Indikator : Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang Disalurkan									
Triwulan III Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2023 thd Triwulan III Tahun 2022 (%)	Target 2023	Realisasi Terhadap		RENSTRA 2020-2024	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III Tahun 2022			Target	Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra
0	0	0.00%	100	0	75	0.00%	24	0.00	

Bantuan sarana KBRL BPBL Lombok tidak dapat dibandingkan dengan BPBL Batam, BPBL Ambon, dan BBPBL Lampung karena BPBL Lombok baru akan melakukan perhitungan pada akhir tahun.

IKU ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 900.000.000 dimana pada Triwulan III Tahun 2023 ini telah terealisasi sebesar Rp 622,009,881 atau 69,11% dari pagu untuk kegiatan survey dan identifikasi di wilayah Bali, NTB, dan NTT serta belanja bahan untuk ATK dan penyerahan bantuan sarana KBRL di wilayah NTB, Bali, dan sebagian NTT.

Pada Triwulan III Tahun 2023 permasalahan yang dihadapi adalah belum adanya penyesuaian rincian output akibat adanya *Automatic Adjustment*.

Tindak lanjut ke depannya dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah melakukan penyesuaian anggaran *Automatic Adjustment* untuk dikembalikan ke anggaran Bendahara Umum Negara (BUN).

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 :

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Di Wilayah Kerja BPBL Lombok

3. Persentase Bantuan Benih yang Disalurkan

BPBL Lombok sebagai salah satu unit pelaksana teknis DJPB mendistribusikan bantuan benih bawal bintang, kakap putih, abalone, ikan hias laut, tiram Mutiara, nila, lele kepada kelompok penerima bantuan dengan rincian sebagai berikut :

- Bawal bintang ukuran minimal 2,5 cm
- Kakap putih ukuran minimal 2,5 cm
- Abalone ukuran minimal 2 cm

- d. Ikan hias laut ukuran minimal 2 cm
- e. Tiram mutiara ukuran minimal 1 cm
- f. Nila ukuran minimal 4 cm
- g. Lele ukuran minimal 4 cm

Pada Triwulan sebelumnya permasalahan yang dihadapi adalah indukan kakap putih yang secara jumlah dan kualitas mulai menurun, banyak berubah dari jantan ke betina sehingga tindak lanjut ke depannya adalah membeli indukan dari BPBL Ambon.

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan III Tahun 2023 ini adalah telah dibelinya indukan kakap putih dan juga Ikan hias dari BPBL Ambon untuk menambah jumlah indukan di BPBL Lombok.

Target bantuan benih baru akan diperhitungkan pada Triwulan IV, dan sampai dengan Triwulan III Tahun 2023, Bantuan benih yang disalurkan baru bertambah sebanyak 129.850 ekor sehingga menjadi 672.062 ekor atau 78% dari target. Berikut adalah tabel capaian realisasi benih dan dokumentasi bantuan benih :

Tabel 5. Bantuan benih yang didistribusikan ke masyarakat

No	Jenis Bantuan	Nama Kelompok	Kab/Kota	Tanggal Distribusi	Komoditas	Jumlah Benih (ekor)
Jumlah Total						672,062
REALISASI BANTUAN BENIH BPBL LOMBOK TAHUN 2023						
Per bulan Januari - 2023						
1	Bantuan Benih Laut	KUB Jangkar Biru	Lombok Timur	26 Januari 2023	Bawal Bintang	22,000
REALISASI BANTUAN BENIH BPBL LOMBOK TAHUN 2023						
Per bulan Februari- 2023						
1	Bantuan Benih Laut	Bagek Kembar	Lombok Barat	8 Februari 2023	Kakap Putih	20,000
2	Bantuan Benih Laut	Dewi Panggungan	Lombok Timur	9 Februari 2023	Kakap Putih	20,000
3	Bantuan Benih Laut	Pade Molah	Lombok Barat	16 Februari 2023	Kakap Putih	25,000
4	Bantuan Benih Laut	Tambak Terune	Lombok Barat	16 Februari 2023	Kakap Putih	7,500

REALISASI BANTUAN BENIH BPBL LOMBOK TAHUN 2023						
Per bulan Maret - 2023						
1	Bantuan Benih Laut	Gili Mangkem	Lombok Timur	16 Maret 2023	Bawal Bintang	15,000
2	Bantuan Benih Laut	KerANJI Bersatu	Lombok Timur	16 Maret 2023	Bawal Bintang	15,000
3	Bantuan Benih Laut	Bertong Bersatu	Lombok Barat	27 Maret 2023	Bawal Bintang	30,000
REALISASI BANTUAN BENIH BPBL LOMBOK TAHUN 2023						
Per bulan April - 2023						
1	Bantuan Benih Laut	Karya Bersama	Lombok Timur	12 April 2023	Kakap Putih	30,000
2	Bantuan Benih Laut	Pondok Jukung Sejati	Lombok Tengah	13 April 2023	Kakap Putih	20,000
REALISASI BANTUAN BENIH BPBL LOMBOK TAHUN 2023						
Per bulan Mei - 2023						
1	Bantuan Benih Laut	Beriok Mekar	Lombok Barat	2 Mei 2023	Kakap Putih	30,000
2	Bantuan Benih Laut	Cantang Berkembang	Lombok Barat	3 Mei 2023	Kakap Putih	25,000
3	Bantuan Benih Laut	Selat Gili	Lombok Timur	19 Mei 2023	Bawal Bintang	15,000
4	Bantuan Benih Laut	Singin Jaya	Lombok Timur	19 Mei 2023	Bawal Bintang	15,000
5	Bantuan Benih Tawar	Neop Mese Opo	TTU	28 Mei 2023	lele	500
6	Bantuan Benih Tawar	Satu Hati	TTU	28 Mei 2023	lele	500
7	Bantuan Benih Tawar	Sehati banopo	TTU	28 Mei 2023	lele	5,250
8	Bantuan Benih Tawar	Manek Tob	TTU	25 Mei 2023	Nila	4,375
9	Bantuan Benih Tawar	Oematfanu	TTU	28 Mei 2023	lele	500
10	Bantuan Benih Tawar	Ersigha	TTU	28 Mei 2023	lele	500
11	Bantuan Benih Tawar	Luni Tbaison	TTU	28 Mei 2023	lele	840
12	Bantuan Benih Tawar	Nailiu Family	TTU	28 Mei 2023	lele	2,625
13	Bantuan Benih Tawar	Olif tataf	TTU	28 Mei 2023	lele	1,470
14	Bantuan Benih Tawar	Atmen Tuakin	TTU	28 Mei 2023	lele	500

15	Bantuan Benih Tawar	Sufa Kau	TTU	27 Mei 2023	lele	1,000
16	Bantuan Benih Tawar	Bin Nefu	TTU	27 Mei 2023	lele	5,040
17	Bantuan Benih Tawar	Mandiri	TTU	27 Mei 2023	lele	1,000
18	Bantuan Benih Tawar	Nefo Aijao	TTU	27 Mei 2023	lele	500
19	Bantuan Benih Tawar	KWT Suka Maju	TTU	27 Mei 2023	lele	500
20	Bantuan Benih Tawar	Aubert jaya	TTU	27 Mei 2023	lele	1,700
21	Bantuan Benih Tawar	Putra Jaya	TTU	27 Mei 2023	lele	500
22	Bantuan Benih Tawar	Harapan Baru	TTU	27 Mei 2023	lele	500
23	Bantuan Benih Tawar	Black Suit	TTU	27 Mei 2023	lele	500
24	Bantuan Benih Tawar	Mekar abadi	TTU	26 Mei 2023	lele	500
25	Bantuan Benih Tawar	Tunas Baru	TTU	26 Mei 2023	lele	500
26	Bantuan Benih Tawar	Manikin Tuan	TTU	26 Mei 2023	lele	500
27	Bantuan Benih Tawar	Polen Kubi	TTU	26 Mei 2023	lele	500
28	Bantuan Benih Tawar	Polen Usapi	TTU	26 Mei 2023	lele	500
29	Bantuan Benih Tawar	Pondok Indah	TTU	26 Mei 2023	lele	500
30	Bantuan Benih Tawar	makmur jaya	TTU	25 Mei 2023	lele	3,150
31	Bantuan Benih Tawar	makmur jaya	TTU	25 Mei 2023	lele	2,030
32	Bantuan Benih Tawar	Tulip Indah	TTU	25 Mei 2023	lele	10,000
33	Bantuan Benih Tawar	Timore	TTU	25 Mei 2023	lele	5,250
34	Bantuan Benih Tawar	Permai	TTU	25 Mei 2023	lele	500
35	Bantuan Benih Tawar	Tunas Harapan Non'niu	TTU	25 Mei 2023	lele	500

36	Bantuan Benih Tawar	Manekat Aplasi	TTU	25 Mei 2023	lele	500
37	Bantuan Benih Tawar	Tua Bolok	TTU	25 Mei 2023	lele	500
38	Bantuan Benih Tawar	Bangkit	TTU	25 Mei 2023	lele	1,000
39	Bantuan Benih Tawar	ST. Arnoldus Yansen	TTU	25 Mei 2023	lele	5,880
40	Bantuan Benih Tawar	Polteno	TTU	25 Mei 2023	lele	1,000
41	Bantuan Benih Tawar	Nekaf Mese	TTU	25 Mei 2023	lele	1,000
42	Bantuan Benih Tawar	Noeneno	TTU	25 Mei 2023	lele	1,000
43	Bantuan Benih Tawar	KWT Setia	TTU	25 Mei 2023	lele	500
44	Bantuan Benih Tawar	Fatunaek	TTU	25 Mei 2023	lele	500
45	Bantuan Benih Tawar	Mandira	Malaka	24 Mei 2023	Nila	1,652

REALISASI BANTUAN BENIH BPBL LOMBOK TAHUN 2023

Per bulan Juni - 2023

1	Bantuan Benih Laut	Segare Lauk	Lombok Timur	23 Juni 2023	Bawal Bintang	15,000
2	Bantuan Benih Laut	Ikhlas Bersama	Lombok Timur	23 Juni 2023	Bawal Bintang	15,000
3	Bantuan Benih Tawar	Meo Mone 1	TTS	Rabu 21 Juni 2023	lele	2,800
4	Bantuan Benih Tawar	Malkokili	TTS	Rabu 21 Juni 2023	lele	10,000
5	Bantuan Benih Tawar	Meo Mone 2	TTS	Rabu 21 Juni 2023	lele	10,000
6	Bantuan Benih Tawar	Len Meto	TTS	Rabu 21 Juni 2023	lele	10,000
7	Bantuan Benih Tawar	Paloil Kuan	TTS	Rabu 21 Juni 2023	lele	10,000
8	Bantuan Benih Tawar	Halan Nekaf A	TTS	Kamis, 22 Juni 2023	lele	3,000

9	Bantuan Benih Tawar	Halan Nekaf B	TTS	Kamis, 22 Juni 2023	lele	3,000
10	Bantuan Benih Tawar	ADIKARA	TTS	Kamis, 22 Juni 2023	lele	15,000
11	Bantuan Benih Tawar	SEHATI II	TTS	Jum'at 23 Juni 2023	lele	1,000
12	Bantuan Benih Tawar	Kuan Lunu	TTS	Jum'at 23 Juni 2023	lele	6,200
13	Bantuan Benih Tawar	Tabua Nekaf	TTS	Jum'at 23 Juni 2023	lele	1,300
14	Bantuan Benih Tawar	Koplen	TTS	Jum'at 23 Juni 2023	lele	1,500
15	Bantuan Benih Tawar	Seky Obe	TTS	Sabtu, 24 Juni 2023	lele	5,200
16	Bantuan Benih Tawar	Exodus	TTS	Sabtu, 24 Juni 2023	lele	2,000
17	Bantuan Benih Tawar	Ora Et Labora	TTS	Sabtu, 24 Juni 2023	lele	5,000
18	Bantuan Benih Tawar	Wani Sukses	KUPANG	Rabu, 28 Juni 2023	lele	700
19	Bantuan Benih Tawar	Semangat Baru	KUPANG	Rabu, 28 Juni 2023	lele	2,500
20	Bantuan Benih Tawar	Usaha Baru	KUPANG	Rabu, 28 Juni 2023	lele	7,000
21	Bantuan Benih Tawar	Nakamase	KUPANG	Rabu, 28 Juni 2023	lele	1,750
22	Bantuan Benih Tawar	Daun Muda	KUPANG	Kamis, 29 Juni 2023	lele	2,500
23	Bantuan Benih Tawar	Tunas Muda Buraen	KUPANG	Kamis, 29 Juni 2023	lele	21,000
24	Bantuan Benih Tawar	Firdaus	KUPANG	Kamis, 29 Juni 2023	lele	19,000
25	Bantuan Benih Tawar	Oekase	KUPANG	Kamis, 29 Juni 2023	lele	16,000
REALISASI BANTUAN BENIH BPBL LOMBOK TAHUN 2023						
Per bulan Juli - 2023						
1	Bantuan Benih Tawar	Tunas Hijau Baun	KUPANG	Sabtu, 1 Juli 2023	lele	1,750
2	Bantuan Benih Laut	KUB Harapan Bersatu	Lombok Timur	3 Juli 2023	Kakap Putih	15,600

3	Bantuan Benih Laut	KUB Tulung Jeleng	Lombok Timur	3 Juli 2023	Bawal Bintang	15,500
4	Bantuan benih Laut	Pelangi	Lombok Timur	20 Juli 2023	Bawal Bintang	25,000
REALISASI BANTUAN BENIH BPBL LOMBOK TAHUN 2023						
Per bulan Agustus - 2023						
1	Bantuan Benih Laut	Gili Indah Permai	Lombok Timur	1 Agustus 2023	Bawal Bintang	25,000
2	Bantuan Benih Laut	Mekar Jaya	Lombok Timur	21 Agustus 2023	Bawal Bintang	27,000
REALISASI BANTUAN BENIH BPBL LOMBOK TAHUN 2023						
Per bulan September - 2023						
1	Bantuan Benih Laut	Telong Indah	Lombok Timur	7 September 2023	Bawal Bintang	20,000



Gambar 10. Dokumentasi penyerahan bantuan Benih Ikan Laut yang disalurkan ke masyarakat

Capaian bantuan benih pada Triwulan III Tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan capaian bantuan benih Triwulan III Tahun 2022 karena pada Triwulan III Tahun 2023 belum dilakukan perhitungan. Adapun tampilan secara singkat atas capaian bantuan benih adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Persentase Bantuan Benih yang Disalurkan

Nama SK :Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan								
Nama Indikator : Persentase Bantuan Benih yang Disalurkan								
Triwulan III Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2023 thd Triwulan III Tahun 2022 (%)	Target 2023	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	RENSTRA 2020-2024	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III Tahun 2022				Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra
-	-	0.00%	100.00	0	100	0.00%	100	0.00

Bantuan benih BPBL Lombok tidak dapat dibandingkan dengan BPBL Batam, BPBL Ambon, dan BBPBL Lampung karena BPBL Lombok baru akan melakukan perhitungan pada akhir tahun.

IKU ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 2.428.966.000 dimana pada Triwulan III Tahun 2023 ini telah terealisasi sebesar Rp 1.825.568.422 atau 75,16% dari pagu untuk belanja barang persediaan, kegiatan pemijahan, pendederan I, pendederan II, dan identifikasi, verifikasi serta distribusi bantuan.

Pada Triwulan III Tahun 2023 terdapat permasalahan yaitu penyaluran bantuan baru bertambah sebanyak 129.850 ekor atau 78% dari target.

Tindak lanjut ke depannya dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan penyaluran bantuan benih untuk memenuhi bantuan benih yang ditargetkan.

4. Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan

BPBL Lombok sebagai salah satu unit pelaksana teknis DJPB pada Tahun 2023 ini bertanggung jawab mendistribusikan bantuan calon induk ikan bawal bintang, kakap putih, Nila, lele dan tiram mutiara kepada kelompok pembudidaya ikan.

IKU ini merupakan IKU baru dimana pada Tahun 2022 tidak ada kegiatan bantuan calon induk yang didistribusikan ke masyarakat, namun pada Tahun 2023 ini BPBL Lombok mendapat tanggung jawab untuk mendistribusikan bantuan calon induk kepada masyarakat.

Pada Triwulan sebelumnya Permasalahan yang terjadi adalah belum dilakukannya identifikasi dan verifikasi untuk calon penerima bantuan calon induk air laut.

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan III Tahun 2023 ini adalah telah dilaksanakannya identifikasi dan verifikasi bantuan calon induk air laut tersebut.

Target bantuan calon induk baru akan diperhitungkan pada Triwulan IV dan pada Triwulan III ini belum dilakukan rekapitulasi BAST sehingga capaian bantuan

calon induk Triwulan III Tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan capaian bantuan calon induk Triwulan III Tahun 2022. Adapun tampilan secara singkat atas capaian bantuan calon induk adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan

Nama SK :Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan									
Nama Indikator : Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan									
Triwulan III Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2023 thd Triwulan III Tahun 2022 (%)	Target 2023	Realisasi Terhadap		RENSTRA 2020-2024	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III Tahun 2022			Target	Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra
-	-	0.00%	0	0	100	0.00%	100	0.00	

Bantuan calon induk BPBL Lombok tidak dapat dibandingkan dengan BBPBL Lampung, BPBL Batam, dan BPBL Ambon karena BPBL Lombok baru akan melakukan perhitungan pada akhir tahun.

IKU ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 78.388.000 dimana pada Triwulan III Tahun 2023 ini telah terealisasi sebesar Rp 54.775.600 atau 87,80% dari pagu untuk kegiatan belanja barang persediaan, identifikasi dan verifikasi serta distribusi bantuan.

Permasalahan yang terjadi pada Triwulan III Tahun 2023 adalah belum dilakukannya rekapitulasi BAST Bantuan calon induk.

Tindak lanjut ke depannya dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah menginstruksikan kepada kepala timja induk dan benih serta tim penyaluran bantuan benih untuk berkoordinasi dalam penyusunan rekapitulasi BAST bantuan calon induk

5. Persentase Calon Induk Unggul yang Diproduksi

Produksi calon induk unggul adalah kegiatan produksi calon induk unggul dari BPBL Lombok untuk mendukung ketersediaan kebutuhan induk unggul. Cara penghitungan IKU ini adalah dengan menghitung hasil produksi calon Induk BPBL Lombok yaitu : Tiram Mutiara, Abalone, Ikan Hias, bawal bintang dan kakap putih.

Pada triwulan sebelumnya terdapat permasalahan yaitu pemeliharaan finfish masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pemeliharaan dari benih ke induk.

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan III Tahun 2023 ini adalah melakukan optimalisasi pemeliharaan calon induk unggul.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 telah diproduksi calon induk unggul sebanyak 841 ekor atau yang terdiri dari calon induk unggul ikan hias sebanyak 441 ekor dan tiram mutiara sebanyak 400 ekor. Berikut adalah tabel capaian produksi calon induk unggul dan dokumentasi kegiatan produksi calon induk unggul ikan hias dan tiram mutiara :

Tabel 8. Persentase Calon Induk Unggul yang Diproduksi

Produksi Calon Induk	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES	TOTAL
Abalone													-
Ikan Hias				65		156	50	30		140			441
Tiram Mutiara						400							400
Kakap putih													-
Bawal Bintang													-
								Jumlah					841



Gambar 6. Dokumentasi kegiatan produksi calon induk unggul

Capaian produksi calon induk unggul pada Triwulan III Tahun 2023 turun sebesar 76.48% dibandingkan capaian produksi calon induk unggul Triwulan III Tahun 2022. adapun tampilan secara singkat atas capaian calon induk unggul ikan laut adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Persentase Calon Induk Unggul yang Diproduksi

Nama SK :Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan									
Nama Indikator : Persentase Calon Induk Unggul yang Diproduksi									
Triwulan III Tahun 2023			Realisasi Triwulan III Tahun 2022	Perbanding an Realisasi Tahun 2023 thd Tahun 2022 (%)	Target 2023 (%)	Realisasi Terhadap		RENSTRA 2020-2024	
Target	Realisasi	Capaian				Target Tahunan (%)	Tahunan	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra
50	60.07	120.14%	255	-76.48	100	60.07%	100	60.07	

Calon Induk Unggul ikan laut yang diproduksi BPBL Lombok prosentase capaiannya lebih rendah dibandingkan dengan BPBL Ambon dan BPBL Batam namun lebih tinggi dari BBPBL Lampung, berikut adalah tabel perbandingannya :

Tabel 10. perbandingan prosentase capaian calon induk unggul ikan laut yang diproduksi

UPT	Prosentase capaian
BPBL Lombok	60.07
BPBL Ambon	108.73
BPBL Batam	109.60
BBPBL Lampung	20.76

IKU ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 387.726.000 dimana pada Triwulan III Tahun 2023 ini telah terealisasi sebesar Rp 361.763.400 atau 93,30% dari pagu untuk kegiatan operasional produksi calon induk finfish dan pemeliharaan calon induk kekerangan.

Pada Triwulan III Tahun 2023 permasalahan yang terjadi adalah meskipun sudah ada realisasi pada tiram mutiara dan ikan hias namun pemeliharaan finfish masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pemeliharaan dari benih ke induk.

Tindak lanjut ke depannya dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan optimalisasi pemeliharaan calon induk unggul yang diproduksi.

6. Persentase Keberhasilan Pengembangan Benih pada Komoditas Lobster

Indikator kinerja ini mengukur persentase keberhasilan UPT Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dalam menghasilkan paket percontohan teknologi pembenihan pada komoditas unggulan lobster yang diselesaikan sampai 100%, dimana tingkat keberhasilan untuk teknologi

pembenihan lobster jika mampu memijahkan dan memelihara larva lobster minimal hingga mencapai fase *phyllosoma*.

IKU ini merupakan IKU Baru dimana pada Tahun 2022 tidak ada IKU Persentase keberhasilan teknologi komoditas unggulan yang dikembangkan lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, namun pada Tahun 2023 ini BPBL Lombok mendapat tanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut.

Pada Triwulan sebelumnya terdapat permasalahan yaitu masih belum optimalnya pemeliharaan larva *phyllosoma* baik untuk jenis lobster Mutiara maupun jenis lobster pasir

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan III Tahun 2023 ini adalah melakukan pemeliharaan calon induk dan indukan lobster (Mutiara dan Pasir) dengan perbaikan manajemen pakan dari jenis kekerangan, krustacea dan ikan-ikan yg sifatnya insidentil. Untuk pemeliharaan larva *phyllosoma* akan terus dilakukan dengan perbaikan teknologi dan peningkatan SDM operator hatchery terkait peningkatan skills dan knowledge dalam manajemen kualitas air dan penyiapan pakan larva.

IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan UPT lainnya karena capaian pada akhir tahun dan tidak dapat dibandingkan dengan IKU tahun sebelumnya karena tahun 2022 tidak ada IKU keberhasilan teknologi komoditas unggulan yang dikembangkan lingkup BPBL Lombok. Adapun tampilan secara singkat atas capaian keberhasilan teknologi komoditas unggulan yang dikembangkan lingkup BPBL Lombok :

Tabel 11. Persentase Keberhasilan Pengembangan Benih pada Komoditas Lobster

Nama SK :Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan									
Nama Indikator :Persentase Keberhasilan Pengembangan Benih pada Komoditas Lobster									
Triwulan III Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan Realisasi Tahun 2023 thd Tahun 2022 (%)	Target 2023	Realisasi Terhadap		RENSTRA 2020-2024	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III Tahun 2022			Target (%)	Tahunan	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra
0	0	0.00%	0	0	100	0.00%		100	0.00

IKU ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 300.000.000 dimana pada Triwulan III Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp 252.083.925 atau 84.03% dari pagu yang digunakan untuk belanja barang, belanja barang operasional, belanja barang pemeliharaan dan belanja

barang persediaan.

Pada Triwulan III Tahun 2023 permasalahan yang dihadapi adalah kematian indukan lobster karena adanya infeksi penyakit *Milky Hemolymph Disease* (MHD) yang menyerang lobster induk mutiara berukuran di atas 1 kg

Tindak lanjut ke depannya dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah menginstruksikan agar ketua pokja lobster untuk melakukan perbaikan manajemen pakan dan manajemen pemeliharaan untuk mencegah kematian indukan lobster yang dipelihara.

7. Persentase Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan Skala Intermediate yang Diproduksi

Indikator kinerja ini merupakan jumlah planlet/propagul yang diproduksi di Laboratorium Kultur Jaringan Rumput Laut Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dimana planlet/ propagul sendiri merupakan bibit rumput laut muda (hasil pembesaran dari mikropropagul). Satu individu planlet adalah rumput laut muda dengan ukuran 2-3 buah *thallus* yang berukuran 2-3 cm dengan berat sekitar 0,2 – 0,3 gr per individu.

IKU ini merupakan IKU Baru dimana pada Tahun 2022 tidak ada kegiatan produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate, namun pada Tahun 2023 ini BPBL Lombok mendapat tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pada Triwulan sebelumnya terdapat permasalahan yaitu proses sterilisasi media air untuk produksi planlet pada lab kultur jaringan masih belum optimal. Hal ini dikarenakan alat sterilisasi berupa *Autoclave* hasil pengadaan bulan Juni 2023 belum bisa dioperasikan karna kondisi jaringan listrik tidak stabil.

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan III Tahun 2023 ini adalah telah dilakukan pembelian Stabilizer untuk menjaga tegangan arus listrik agar stabil (normal), dimana arus yang stabil sangat dibutuhkan untuk berbagai peralatan elektronik.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2023, produksi bibit rumput laut kultur jaringan telah terealisasi sebanyak 2.532 planlet atau 84.40% dari target produksi bibit rumput laut kultur jaringan, berikut adalah tabel capaian produksi bibit rumput laut kultur jaringan dan dokumentasi kegiatan Pemeliharaan/penumbuhan mikropopagul menjadi thalus muda/planlet :

Tabel 12. Persentase Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan Skala Intermediate yang Diproduksi

No.	Bulan	Jumlah Produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate	Jumlah Kumulatif Produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate	Prosentase capaian Produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate
1	Januari	0	0	0
2	Februari	0	0	0
3	Maret	0	0	0
4	April	0	0	0
5	Mei	607	607	20.23%
6	Juni	713	1320	44.00%
7	Juli	612	1932	64.40%
8	Agustus	0	1932	64.40%
9	September	600	2532	84.40%



Gambar 7. Pemeliharaan mikropropagul menjadi thalus muda

IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan IKU tahun sebelumnya karena tahun 2022 tidak ada IKU produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate di UPT BPBL Lombok. Adapun tampilan secara singkat atas produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate di UPT BPBL Lombok adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Capaian Persentase Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan Skala Intermediate yang Diproduksi

Nama SK :Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan									
Nama Indikator : Persentase Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan Skala Intermediate yang Diproduksi									
Triwulan III Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan Realisasi	Target 2023	Realisasi Terhadap		RENSTRA 2020-2024	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III Tahun 2022	Tahun 2023 thd Tahun 2022 (%)		Target	Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra
75	84.40	112.53%	0	0	100	84.40%		100	84.40

Prosentase Produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate di BPBL Lombok lebih rendah daripada BBPBL Lampung dan BPBL Ambon, sedangkan BPBL Batam tidak mempunyai target Produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate, berikut adalah tabel perbandingannya :

Tabel 14. perbandingan prosentase capaian Produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate

UPT	Prosentase capaian
BPBL Lombok	84.40
BPBL Ambon	199.30
BPBL Batam	0.00
BBPBL Lampung	122.17

IKU ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 500.000.000 dimana pada Triwulan III Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp 398.277.683 atau 79,66% dari pagu yang digunakan untuk kegiatan belanja barang operasional, belanja barang persediaan, belanja modal peralatan dan rehab Lab kultur jaringan.

Pada Triwulan III Tahun 2023 terdapat permasalahan yaitu keterlambatan pengiriman mikropropagul karena biotrop masih mengutamakan penyelesaian pesanan dari direktorat perbenihan untuk modelling rumput laut di wakatobi, sehingga pesana mikropopropagul untuk BPBL Lombok baru bisa dipenuhi di TW IV.

Tindak lanjut ke depannya dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah menginstruksikan ketua timja produksi berkoordinasi dengan biotrop terkait pesanan mikropropagul supaya dapat mencapai target pada Triwulan IV.

8. Persentase Sarana dan Prasarana Bioflok yang Disalurkan

Bioflok yang disalurkan ke masyarakat dengan kriteria yang tercantum dalam Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya nomor 328 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah sarana dan prasarana budidaya ikan lele dan/atau ikan nila sistem bioflok Tahun Anggaran sebagai berikut :

- a. benih ikan ;
- b. pakan ikan *starter*;
- c. Pakan ikan *Grower* dan *finisher*;
- d. obat ikan dan vitamin;
- e. prasarana dan sarana operasional;

- f. peralatan perikanan;
- g. pendampingan teknis bioflok.

Pada Triwulan sebelumnya terdapat permasalahan yaitu adanya perubahan juknis penyaluran bantuan pemerintah bioflok dari Peraturan Dirjen No. 182 Tahun 2023 menjadi Peraturan Dirjen No 262 Tahun 2023 yang baru ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2023.

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan III Tahun 2023 ini adalah dilakukan percepatan proses pengadaan bioflok sehingga kegiatan dapat dilaksanakan pada Triwulan III ini.

Target bantuan bioflok baru akan diperhitungkan pada Triwulan IV dan pada Triwulan III ini telah dilakukan beberapa kegiatan penyaluran bantuan bioflok dan juga adanya tambahan bantuan bioflok sebanyak 45 paket yang akan disalurkan ke beberapa wilayah di Indonesia

IKU ini belum ada realisasi capaian, namun dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2022 capaiannya turun sebesar 100%. Adapun tampilan bantuan bioflok secara singkat adalah sebagai berikut :

Tabel 15. Persentase Sarana dan Prasarana Bioflok yang Disalurkan

Nama SK :Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan									
Nama Indikator : Persentase Sarana dan Prasarana Bioflok yang Disalurkan									
Triwulan III Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan Realisasi Tahun 2023 thd Tahun 2022 (%)	Target 2023	Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024		
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III Tahun 2022			Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra	
0	0	0.00%	70.59	-100	100	0.00%	100	0.00	

Bantuan sarana dan prasarana bioflok yang disalurkan pada BPBL Lombok prosentase capaiannya lebih rendah daripada BBPBL Lampung dan BPBL Batam, namun sama dengan BPBL Ambon karena baru diperhitungkan pada akhir tahun. Berikut adalah tabel perbandingannya :

Tabel 16. perbandingan prosentase sarana dan prasarana bioflok yang disalurkan

UPT	Prosentase capaian
BPBL Lombok	0.00
BPBL Ambon	0.00
BPBL Batam	62.50
BBPBL Lampung	23.33

IKU ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp 16.125.000.000 dimana pada Triwulan III Tahun 2023 ini telah terealisasi sebesar Rp. 3.698.718.904 atau 22,94 % dari pagu yang digunakan untuk belanja bahan ATK kegiatan, bantuan ke wilayah NTB, NTT, Bali dan survey serta identifikasi di wilayah Bali, NTB juga NTT baik di bantuan Tahap I maupun Tahap II.

Pada Tahun Triwulan III Tahun 2023 terdapat permasalahan yaitu adanya addendum kontrak karena kesulitan air (musim kemarau) seperti di Bali dan NTT terkait masa pengerjaan.

Tindak lanjut ke depannya dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah dengan memberikan instruksi kepada PPK untuk memantau secara periodik proses pengerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.

9. Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan

Diseminasi adalah suatu kegiatan yang interaktif dalam menyampaikan informasi yang mana ditujukan kepada kelompok masyarakat ataupun individu.

IKU ini merupakan IKU Baru dimana pada Tahun 2022 tidak ada kegiatan diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat, namun pada Tahun 2023 ini BPBL Lombok mendapat tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pada Triwulan sebelumnya permasalahannya adalah belum bisa dilaksanakannya diseminasi teknologi yang kedua di wilayah Bima.

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan III Tahun 2023 ini adalah melaksanakan kegiatan diseminasi di Bima pada bulan Agustus 2023, berikut adalah dokumentasi kegiatan tersebut :



Gambar 13. Kegiatan Temu Lapang di Bima

IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan IKU tahun sebelumnya karena tahun 2022 tidak ada IKU persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat. Adapun tampilan secara singkat atas capaian IKU persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan

Nama SK :Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan									
Nama Indikator : Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan									
Triwulan III Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan Realisasi Tahun 2023 thd Tahun 2022 (%)	Target 2023	Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024		
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III Tahun 2022			Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra	
0	0	0.00%	0	0	100	0.00%	100	0.00	

Diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat di BPBL Lombok lebih rendah daripada BBPBL Lampung, BPBL Ambon, dan BPBL Batam. Berikut adalah tabel perbandingannya :

Tabel 18. perbandingan prosentase Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan

UPT	Prosentase capaian
BPBL Lombok	0.00
BPBL Ambon	100.00
BPBL Batam	100.00
BBPBL Lampung	100.00

IKU ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp 300.000.0000 dimana pada Triwulan III Tahun 2023 ini telah terealisasi sebesar Rp. 197.874.908 atau 65,96% dari pagu yang digunakan untuk kegiatan diseminasi teknologi.

Pada Tahun Triwulan III Tahun 2023 permasalahan yang terjadi adalah belum adanya koordinasi untuk pelaksanaan diseminasi yang ketiga.

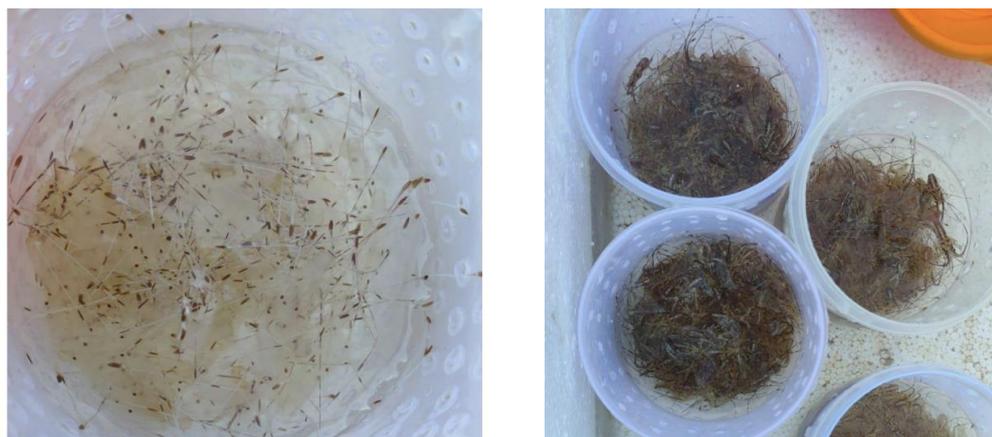
Tindak lanjut ke depannya dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan koordinasi secara lebih intensif kepada tenaga ahli (TA) untuk pelaksanaan kegiatan diseminasi teknologi pembesaran ikan ke masyarakat yang ketiga.

10. Persentase Model Usaha Pembesaran Budidaya Lobster yang Dikembangkan

Pembangunan perikanan budidaya berbasis komoditas unggulan menjadi salah satu program prioritas yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2023, program prioritas yang menjadi target Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok yaitu mengembangkan model usaha budidaya komoditas unggulan (komoditas lobster) untuk segmentasi pembesaran di Karamba Jaring Apung.

Pada Triwulan sebelumnya terdapat permasalahan yaitu pada pengadaan bibit lobster Mutiara ukuran >100 gr sebagai komoditas yang akan digunakan dalam pengembangan model usaha budidaya komoditas unggulan pada instalasi lobster di telong elong .

Perbaikan yang sudah dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2023 ini adalah melakukan pengadaan benih khususnya jenis lobster Mutiara dengan ukuran >100 gr. Berikut adalah dokumentasi pengadaan benih lobster mutiara :



Gambar 14. Pengadaan benih lobster mutiara

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 Jumlah lobster pasir adalah 621 ekor dan lobster Mutiara berjumlah 552 ekor dengan berat antara >270 gram – 450 gram per ekornya. Untuk pemberian pakan dilakukan secara rutin setiap hari pada sore hari dengan frekuensi pemberian pakan sebanyak 1 kali sehari. Total jumlah pakan yang diberikan perharinya berkisar 30 Kg ikan segar per harinya.

IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan UPT lainnya karena capaian pada akhir tahun dan tidak dapat dibandingkan dengan IKU tahun sebelumnya karena tahun 2022 tidak ada IKU Persentase Model Usaha Budidaya Komoditas Unggulan yang Dikembangkan oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok. Adapun tampilan secara singkat atas capaian Persentase Model Usaha Budidaya Komoditas Unggulan yang Dikembangkan oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok adalah sebagai berikut :

Tabel 19. Persentase Model Usaha Pembesaran Budidaya Lobster yang Dikembangkan

Nama SK : Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan									
Nama Indikator : Persentase Model Usaha Pembesaran Budidaya Lobster yang Dikembangkan									
Triwulan III Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2023 thd Triwulan III Tahun 2022 (%)	Target 2023	Realisasi Terhadap		RENSTRA 2020-2024	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III Tahun 2022			Target (%)	Tahunan	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra
0	0	0.00%	0	0	100%	0.00%	100	0.00	

IKU ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 350.000.000 dimana pada Triwulan III Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp 145.892.850 atau 96,79 % dari pagu yang digunakan untuk pengadaan ponton dan rumah jaga.

Adapun permasalahan yang dihadapi pada Triwulan III Tahun 2023 yaitu jumlah petakan/lubang budidaya terkait sarana pembesaran di telong elong masih terbatas jumlahnya sehingga kesulitan untuk melakukan penjarangan.

Tindak lanjut ke depannya adalah mengirimkan Keramba Jaring Apung (KJA) dri sekotong ke telong elong dalam rangka menambah petakan budidaya.

11. Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Hias yang Disalurkan

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Hias TA 2023, BPBL Lombok sebagai salah satu unit pelaksana teknis DJPB mendistribusikan bantuan Sarana dan Prasarana ikan hias kepada kelompok pembudidaya ikan, dimana bantuan yang diberikan berupa paket ikan koi 4, yang terdiri dari :

- a. Induk;
- b. Pakan;
- c. Wadah budidaya;
- d. Peralatan dan papan nama;
- e. Obat ikan dan vitamin.

IKU ini merupakan IKU Baru dimana pada Tahun 2022 tidak ada kegiatan sarana dan prasarana budidaya ikan hias yang disalurkan ke masyarakat, namun pada Tahun 2023 ini BPBL Lombok mendapat tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pada Triwulan sebelumnya terdapat permasalahan yaitu belum bisa dilaksanakannya kegiatan serah terima bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan hias,

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan III Tahun 2023 ini adalah melaksanakan kegiatan serah terima bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan hias pada Triwulan III. Berikut adalah dokumentasi kegiatan serah terima bantuan sarana dan prasarana ikan hias:



Gambar 15. Kegiatan penyerahan bantuan sarana dan prasarana ikan hias

Capaian IKU ini pada akhir tahun dan tidak dapat dibandingkan dengan IKU tahun sebelumnya karena tahun 2022 tidak ada IKU Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias yang disalurkan ke masyarakat. Adapun tampilan secara singkat atas capaian Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias yang disalurkan ke masyarakat :

Tabel 20. Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Hias yang Disalurkan

Nama SK :Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan									
Nama Indikator : Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Hias yang Disalurkan									
Triwulan III Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan Realisasi Tahun 2023 thd Tahun 2022 (%)	Target 2023	Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024		
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III Tahun 2022			Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra	
0	0	0.00%	0	0	100	0.00%	100	0.00	

Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Hias yang disalurkan ke masyarakat di BPBL Lombok lebih rendah daripada BPBL Lampung dan dan BPBL Batam karena BPBL Lombok baru akan melakukan perhitungan di akhir tahun, sedangkan IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan BPBL Ambon karena BPBL Ambon tidak mempunyai IKU Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Hias yang disalurkan ke masyarakat . Berikut adalah tabel perbandingannya :

Tabel 5. perbandingan Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Hias yang Disalurkan

UPT	Prosentase capaian
BPBL Lombok	0.00
BPBL Ambon	-
BPBL Batam	100.00
BBPBL Lampung	100.00

IKU ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 270.000.000 dimana pada Triwulan III Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp 264.779.210 atau 98,07% dari pagu yang digunakan untuk belanja bahan ATK kegiatan, kegiatan survey dan identifikasi serta bantuan masyarakat.

Pada Triwulan III Tahun 2023 permasalahan yang dihadapi adalah belum adanya penyesuaian rincian output akibat adanya *Automatic Adjustment*.

Tindak lanjut ke depannya dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah melakukan penyesuaian anggaran *Automatic Adjustment* untuk dikembalikan ke anggaran Bendahara Umum Negara (BUN).

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 :

Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan

12. Persentase Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan yang Diuji

Kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji adalah suatu kegiatan pelayanan pengujian sampel oleh laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan BPBL Lombok yang terdiri dari pengujian kualitas air, patologi, mikrobiologi (non AMR), dan biologi molekuler.

Pada Triwulan sebelumnya terdapat permasalahan yaitu masih belum intensnya kegiatan pengambilan sampel lab kesling.

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan III Tahun 2023 ini adalah meningkatkan intensitas dalam melaksanakan kegiatan pengambilan sampel di beberapa wilayah di NTB.

Pada Triwulan III Tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan Akreditasi Laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, berikut adalah dokumentasi kegiatan akreditasi Lab kesehatan ikan dan lingkungan :



Gambar 16. Kegiatan akreditasi laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan

Selain itu Sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 ini, BPBL telah menguji sebanyak 2250 sampel atau 161.75 % dari target sampel sebanyak 1.391 sampel. Berikut ini adalah rincian jumlah sampel dan dokumentasi kegiatan pengambilan sampel :

Tabel 22. Realisasi Jumlah sampel yang diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan

No.	Bulan	Ruang Lingkup Uji				Jumlah	Kumulatif	PROSENTASE CAPAIAN SAMPEL KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN
		Kualitas Air	Molekuler	Mikrobiologi	Parasit dan Patologi			
1	Januari	73	17	16	15	121	121	8.70
2	Februari	71	15	6	8	100	221	15.89
3	Maret	104	8	33	3	148	369	26.53
4	April	351	6	19	7	383	752	54.06
5	Mei	119	58	13	9	199	951	68.37
6	Juni	239	19	24	9	291	1242	89.29
7	Juli	340	28	24	9	401	1643	118.12
8	Agustus	353	11	25	7	396	2039	146.59
9	September	161	10	33	7	211	2250	161.75

Prosentase sampel kesehatan ikan dan lingkungan pada Triwulan III Tahun 2023 turun sebesar 16.04 % dari capaian sampel Triwulan III Tahun 2022, adapun tampilan secara singkat atas capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 23. Persentase sampel kesehatan ikan dan lingkungan yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium

Nama SK :Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan								
Nama Indikator : Persentase sampel Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang diuji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok								
Triwulan II Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan Realisasi Tahun 2023 thd Tahun 2022 (%)	Target 2023	Realisasi	RENSTRA 2020-2024	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan II Tahun 2022			Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra
50	89.29	178.58%	106.35	-16.04	100	89.29%	2,600	3.43

Jumlah prosentase capaian sampel yang diuji di BPBL Lombok capaiannya lebih rendah dibandingkan BPBL Batam dan BPBL Ambon namun lebih tinggi dari BBPBL Lampung. Berikut adalah tabel perbandingannya :

Tabel 24. Perbandingan Persentase Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan yang Diuji

UPT	Prosentase capaian
BPBL Lombok	161.75
BPBL Ambon	167.11
BPBL Batam	124.00
BBPBL Lampung	115.06

IKU ini didukung pagu anggaran sebesar Rp 402.660.000 dimana pada Triwulan III Tahun 2023 ini telah terealisasi sebesar 357.875.823 atau 88,88% dari pagu yang digunakan untuk belanja bahan dan belanja barang persediaan, kalibrasi dan perjalanan dinas .

Pada Triwulan III Tahun 2023 ini terdapat permasalahan yaitu adanya beberapa temuan pada saat akreditasi laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.

Tindak lanjut ke depannya dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah menginstruksikan kepada tim Laboratorium untuk menindaklanjuti temuan akreditasi tersebut.

13. Persentase Pengujian Antimikrobal Resistance (AMR)

Resistensi antimikroba adalah suatu keadaan dimana mikroorganisme mampu untuk bertahan pada dosis terapi senyawa antimikroba, sehingga mikroorganisme tersebut masih mampu berkembang, mengurangi keampuhan obat, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, memperparah, dan menyebabkan kematian dalam tindakan pengobatan pada manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan. Pengendalian Resistansi Antimikroba (*Antimicrobial Resistance/AMR*) merupakan aktivitas yang ditujukan untuk mencegah dan/atau menurunkan adanya kejadian mikroba resistan.

Sesuai dengan INPRES No 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan

Nuklir, Biologi, dan Kimia serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistansi Antimikroba (RAN PRA) Tahun 2020-2024, dimana KKP dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya berkontribusi dalam pengendalian resistansi antimikroba pada sektor kesehatan ikan, salah satu strategi pada RAN PRA tahun 2020-2024 adalah peningkatan pengetahuan dan bukti ilmiah melalui surveilans dan penelitian.

Pengujian resistansi antimikroba oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok untuk mengetahui tingkat resistansi mikroba akibat penggunaan antimikroba, dimana semakin kecil tingkat resistansi mikroba, semakin bagus pengendalian resistansi antimikrobanya.

Pada Triwulan sebelumnya terdapat permasalahan yaitu Pada Triwulan III Tahun 2023 terdapat permasalahan yaitu masih belum intensnya kegiatan pengambilan sampel AMR .

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan III Tahun 2023 ini adalah lebih intens dalam melaksanakan kegiatan pengambilan sampel di beberapa wilayah di NTB.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2023, BPBL Lombok telah menguji sampel AMR sebanyak 42 sampel atau 82.35% dari 51 target sampel AMR. Berikut adalah rincian jumlah sampel AMR dan dokumentasi uji sampel AMR :

Tabel 25. Realisasi Jumlah sampel AMR

No.	Bulan	Ruang Lingkup Uji AMR	Kumulatif	PROSENTASE CAPAIAN SAMPEL
1	Januari	4	4	7.84
2	Februari	3	7	13.73
3	Maret	6	13	25.49
4	April	3	16	31.37
5	Mei	9	25	49.02
6	Juni	5	30	58.82
7	Juli	2	32	62.75
8	Agustus	4	36	70.59
9	September	6	42	82.35



Gambar 17. Kegiatan pengambilan sampel AMR

IKU Persentase sampel antimikrobal resistance (AMR) yang diuji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok turun sebesar 38.73 % jika dibandingkan dengan IKU capaian sampel tersebut pada Tahun 2022. adapun tampilan secara singkat atas capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 26. Persentase sampel antimikrobal resistance (AMR) yang diuji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Nama SK :Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan								
Nama Indikator : Persentase Pengujian Antimikrobal Resistance (AMR)								
Triwulan III Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan Realisasi TW III 2023 dibandingkan TW III 2022	Target 2023	Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan Tahun 2022			Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra
75	82.35	109.80%	184	-55.29	100	82.35%	100	82.35

Jumlah prosentase capaian sampel AMR BPBL Lombok capaiannya lebih rendah dibandingkan BBPBL Lampung, BPBL Batam dan BPBL Ambon. Berikut adalah tabel perbandingannya :

Tabel 27. Perbandingan prosentase capaian jumlah sampel AMR UPT Laut

UPT	Prosentase capaian
BPBL Lombok	82.35
BPBL Ambon	145.10
BPBL Batam	126.00
BBPBL Lampung	104.65

IKU ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 44.393.000 dimana pada Triwulan III Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp 28.640.068 atau 64.51 % dari pagu yang digunakan untuk kegiatan perjalanan dinas pengambilan sampel, survey AMU, dan Belanja barang persediaan.

Pada Triwulan III Tahun 2023 terdapat permasalahan yaitu masih belum intensnya kegiatan pengambilan sampel AMR.

Tindak lanjut ke depannya dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah dengan menginstruksikan kepada tim Laboratorium untuk lebih intens dalam melaksanakan kegiatan pengambilan sampel.

14. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Lombok

Indikator kinerja IKU ini adalah adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas ASN diukur menggunakan standar profesionalitas ASN. Standar professional ASN terdiri dari empat dimensi, yaitu :

1. Kualifikasi, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS,
2. Kompetensi, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja, yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Seminar/Workshop/Magang/Sejenis;

3. Kinerja, merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Alat ukur yang digunakan adalah rata-rata kinerja individu pada suatu unit kerja;
4. Disiplin, merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Alat ukur yang digunakan persentase jumlah PNS yang memperoleh hukuman disiplin berdasarkan tingkatan hukuman disiplin.

Pada Triwulan sebelumnya permasalahan yang terjadi adalah BPBL Lombok masih dalam kategori SEDANG dalam nilai IP ASN

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan III Tahun 2023 ini adalah mengingatkan kepada seluruh pegawai supaya pegawai selain memasukkan sertifikat di aplikasi *e-SKP BKN*, juga memasukkan di aplikasi *pegawai KKP* yang menjadi dasar penghitungan nilai IP ASN.

Target IP ASN baru akan diperhitungkan lagi pada Triwulan IV atau semester II, namun IP ASN BPBL Lombok sudah naik menjadi 86, 72.

IKU ini belum dapat dibandingkan dengan UPT lainnya dan tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu karena capaian akan dihitung pada Triwulan IV atau semester II. Adapun tampilan secara singkat atas capaian IP ASN BPBL Lombok adalah sebagai berikut :

Capaian IKU ini pada Triwulan III Tahun 2023 naik sebesar 14.02 % dibandingkan capaian pada IKU Triwulan III Tahun 2022. Adapun tampilan secara singkat atas capaian IP ASN BPBL Lombok adalah sebagai berikut :

Tabel 28. Indeks profesionalitas ASN lingkup satker BPBL Lombok

Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok								
Nama Indikator : Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Lombok								
Triwulan III Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan	Target 2023	Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan Tahun 2022	Realisasi TW III 2023 dibandingkan TW III 2022		Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra
0	0	0.00%	0	0	81	0.00%	81	0.00

Tidak ada alokasi anggaran khusus untuk indikator kinerja ini dan Permasalahan yang terjadi pada Triwulan III Tahun 2023 ini adalah masih ditemukan banyak pegawai yang telah mengikuti BIMTEK maupun pelatihan lainnya BELUM mengupdate data Kursus di e-pegawai . Tindak lanjut ke depannya dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah menginstruksikan kasubbag umum untuk mengingatkan kepada seluruh pegawai supaya pegawai selain memasukkan sertifikat di aplikasi *e-SKP BKN*, juga memasukkan di aplikasi *pegawai KKP* yang menjadi dasar penghitungan nilai IP ASN.

15. IKU Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

Unit Kerja yang berpredikat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan pelayanan publik.

Pada Triwulan sebelumnya permasalahan yang terjadi adalah masih banyak ketua dan anggota ZI yang belum memasukkan dokumen WBK ke google drive khusus untuk WBK Tahun 2023

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan III Tahun 2023 ini adalah memonitoring dokumen WBK yang telah *terupload* di google drive khusus WBK dimana baru area 5 atau penguatan pengawasan yang sudah mulai melengkapi data di google drive khusus WBK.

IKU ini belum dapat dibandingkan dengan UPT lainnya dan tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu karena capaian akan dihitung pada akhir tahun. Adapun tampilan secara singkat atas capaian Hasil penilaian pembangunan ZI menuju WBK di Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok adalah sebagai berikut :

Tabel 29. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok								
Nama Indikator : Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi								
Triwulan III Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan	Target 2023	Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III Tahun 2022	Realisasi TW III 2023 dibandingkan TW III 2022		Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra
0	0	0.00%	0	0	81	0.00%	81	0.00

Tidak ada alokasi anggaran khusus untuk indikator ini dan permasalahan yang terjadi pada Triwulan III Tahun 2023 ini adalah masih terdapat beberapa area yang belum melengkapi dokumen di google drive WBK Tahun 2023.

Tindak lanjut ke depannya dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah menginstruksikan kepada ketua area yang belum melengkapi dokumennya di google drive WBK Tahun 2023.

16. IKU Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBL Lombok

Prosentase penyelesaian LHP BPK BPBL Lombok merupakan penghitungan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan/ LHP BPK yang dilaksanakan di BPBL Lombok sebagai bentuk komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas yang dapat berpengaruh pada persepsi laporan keuangan BPBL Lombok.

Pada Triwulan sebelumnya permasalahan yang terjadi adalah adanya surat dari Auditor Utama Keuangan Negara IV No. 73/S/XVII/06/2023 tanggal 27 Juni 2023 perihal pemberitahuan pengumpulan data dan informasi dimana BPK akan melakukan pemeriksaan kinerja atas program pendukung kebijakan ekonomi biru serta perencanaan pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) kepatuhan atas pengelolaan pendapatan PNBP lainnya serta belanja barang dan Jasa Tahun 2022-2023 (Semester I) pada tanggal 5 s/d 26 Juli 2023.

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan III Tahun 2023 ini adalah melakukan pengumpulan dokumen permintaan dari BPK tersebut.

IKU ini belum dapat dibandingkan dengan UPT lainnya dan tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu karena capaian akan dihitung pada akhir tahun. Adapun tampilan secara singkat atas capaian prosentase penyelesaian LHP BPK Satker BPBL Lombok adalah sebagai berikut :

Tabel 30. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBL Lombok

Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok								
Nama Indikator : Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBL Lombok								
Triwulan III Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan		Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III Tahun 2022	Realisasi TW III 2023 dibandingkan TW III 2022	Target 2023	Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra
0	0	0.00%	0	0	100	0.00%	100	0.00

Tidak ada alokasi anggaran khusus untuk indikator kinerja ini dan belum ada LHP BPK yang harus diselesaikan pada Triwulan III ini, namun BPBL Lombok akan tetap melaksanakan penyusunan dan pendokumentasian dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

17. IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPBL Lombok

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penilaian atas Kinerja Lingkup BPBL Lombok yang dilakukan melalui Rekonsiliasi antara Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya / DJPB dengan Biro perencanaan dengan tujuan agar pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntabilitas dan peraturan yang ada. Dengan adanya rekon kinerja diharapkan terjadi sinergi yang baik antara satker UPT dan DJPB dalam mempercepat capaian kinerja yang sudah ditetapkan.

Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.

Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 5 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (10%), dan capaian kinerja (20%).

Pada Triwulan sebelumnya permasalahan yang terjadi adalah penghitungan ketepatan waktu dalam menyampaikan LKj di website BPBL Lombok.

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan III Tahun 2023 ini adalah menyampaikan LKj ke website BPBL Lombok secara tepat waktu.

IKU ini belum dapat dibandingkan dengan UPT lainnya dan tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu karena capaian akan dihitung pada akhir tahun. Adapun tampilan secara singkat atas capaian nilai rekon SAKIP lingkup BPBL Lombok adalah sebagai berikut :

Tabel 31. Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPBL Lombok

Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok								
Nama Indikator : Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPBL Lombok								
Triwulan III Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan Realisasi TW III 2023 dibandingkan TW III 2022	Target 2023	Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan Tahun 2022			Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra
0	0	0.00%	0	0	100	0.00%	90	0.00

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada IKU ini dan permasalahan pada Triwulan III Tahun 2023 ini adalah adanya perubahan indikator kinerja pada perjanjian kerja dan juga perubahan kepala tim kerja BPBL Lombok sehingga perlu segera dilakukan penyusunan dokumen sesuai dengan perubahan yang terbaru.

Tindak lanjut ke depannya dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah Menyusun dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja dengan perubahan yang terbaru

18. IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPBL Lombok

Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPBL Lombok adalah prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan di BPBL Lombok yang telah ditindaklanjuti dengan status tuntas. Cara perhitungan ini adalah dokumen yang tindak lanjutnya telah tuntas diselesaikan dibandingkan dengan jumlah temuan hasil pengawasan.

Pada triwulan sebelumnya permasalahan yang terjadi adalah belum terselesaikannya 1 (satu) tindak lanjut atas rekomendasi itjen.

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan III Tahun 2023 ini adalah meminta PPK untuk mengikuti sertifikasi bagi PPK.

Pada Triwulan III Tahun 2023 berdasarkan surat dari sesditjen perikanan budidaya nomor B.7280/DJPB.1/HP.330/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 perihal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Lingkup DJPB” Triwulan III Tahun 2023, nilai BPBL Lombok masih sebesar 93.33% atau masih ada 1 rekomendasi yang belum tuntas untuk ditindaklanjuti oleh BPBL Lombok. Berikut adalah Capaian IKU prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja satker Lingkup DJPB Triwulan III Tahun 2023 dibandingkan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup DJPB lainnya :

Tabel 32. Perbandingan prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan

Data Rekapitulasi Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP” Triwulan III Tahun 2023

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi
1	Setditjen Perikanan Budidaya	73	68	93.15	5
2	Direktorat Pakan dan Obat Ikan	9	8	88.89	1
3	Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	23	23	100.00	0
4	Direktorat Perbenihan	0	0	100.00	0
5	Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya	0	0	100.00	0
6	BBPBL Lampung	0	0	100.00	0
7	BBPBAT Sukabumi	0	0	100.00	0
8	BBPBAP Jepara	0	0	100.00	0
9	BPBL Ambon	21	21	100.00	0
10	BPBAP Ujung Batee	17	17	100.00	0
11	BPBAP Takalar	46	46	100.00	0
12	BPBAT Sungai Gelam	9	9	100.00	0
13	BPBAT Tatelu	35	35	100.00	0
14	BPBAP Situbondo	0	0	100.00	0
15	BPBAT Mandiangin	0	0	100.00	0
16	BPBL Lombok	15	14	93.33	1
17	BPBL Batam	15	15	100.00	0
18	BLUPPB Karawang	23	23	100.00	0
19	BPIU2K Karangasem	0	0	100.00	0
20	BPKIL Serang	0	0	100.00	0
TOTAL		286	279	97.55	7

Capaian IKU ini turun sebesar 6.67% dibandingkan Triwulan III Tahun 2022, Adapun tampilan secara singkat atas capaian Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok adalah sebagai berikut :

Tabel 33. Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup satker BPBL Lombok

Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok								
Nama Indikator : Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPBL Lombok								
Triwulan III Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan	Target 2023	Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III Tahun 2022	Realisasi TW III 2023 dibandingkan TW III 2022	Target 2023	Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra
75	93.33	124.44%	100	-6.67	100	93.33%	90	103.70

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini dan Pada Triwulan III Tahun 2023 permasalahan yang dapat terjadi adalah masih belum terselesaikannya 1 (satu) tindak lanjut atas rekomendasi itjen tersebut.

Tindak lanjut ke depannya dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah dengan menginstruksikan kepada kasubbag Umum untuk menyelesaikan rekomendasi tersebut sehingga tidak ada sisa rekomendasi di BPBL Lombok.

19. IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPBL Lombok

Nilai IKPA adalah Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan *spending review* terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 8 (delapan) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Devisiasi RDP, Penyerapan anggaran, belanja kontraktual, Penyelesaian Tagihan, pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output.

Pada triwulan sebelumnya permasalahan yang terjadi adalah adanya akun hutang yang belum diterima tagihannya sampai dengan periode bulan ke 6 karena BAST dari penyedia ke PPK dilaksanakan pada akhir Juni yang menyebabkan SPPD baru bisa diterbitkan pada bulan berikutnya yaitu bulan Juli

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan III Tahun 2023 ini adalah dilakukan koordinasi antara tim Pengadaan Barang dan Jasa dengan Operator Komitmen supaya BAST dilaksanakan pada awal bulan atau tengah bulan sehingga pembayaran bisa dilakukan pada bulan yang sama dan tidak menjadi hutang.

IKU ini belum dapat dibandingkan dengan UPT lainnya dan tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu karena capaian akan dihitung pada Triwulan IV atau Semester II. Adapun tampilan secara singkat atas capaian nilai IKPA satker BPBL Lombok adalah sebagai berikut :

Tabel 34. Nilai IKPA Satker BPBL Lombok

Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok								
Nama Indikator :Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPBL Lombok								
Triwulan III Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan	Target 2023	Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III Tahun 2022	Realisasi TW III 2023 dibandingkan TW III 2022		Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra
0	0	0.00%	0.00	0	89	0.00%	89	0.00

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini dan Pada Triwulan III Tahun 2023 ini permasalahan yang terjadi adalah adanya pergantian kepala balai sehingga membutuhkan waktu untuk pergantian admin KPA di aplikasi SAKTI dan juga adanya menu baru proyeksi capaian output dimana operator komitmen harus mengisi proyeksi capaian output sebelum bulan September.

Tindak lanjut ke depannya dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah menginstruksikan kepada admin aplikasi SAKTI untuk mengganti user KPA dan juga menginstruksikan kepada operator komitmen untuk segera mengisi proyeksi capaian output sebelum batas waktu yang ditentukan.

20. IKU Nilai Kinerja Anggaran BPBL Lombok

Nilai Kinerja Anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya yang perhitungannya diperoleh melalui aplikasi SMART DJA.

Pada aplikasi SMART DJA, pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya.

Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga.

Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah.

Pada triwulan sebelumnya terdapat permasalahan yang terjadi adalah kurang tepat waktunya pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI yang menyebabkan data capaian output pada aplikasi SMART DJA tidak segera terisi.

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan III Tahun 2023 ini adalah berkoordinasi dengan operator komitmen dalam hal pengisian capaian output aplikasi SAKTI.

IKU ini belum dapat dibandingkan dengan UPT lainnya dan tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu karena capaian akan dihitung pada akhir tahun. Adapun tampilan secara singkat atas capaian NKA satker BPBL Lombok adalah sebagai berikut :

Tabel 35. Nilai Kinerja Anggaran BPBL Lombok

Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok								
Nama Indikator : Nilai Kinerja Anggaran BPBL Lombok								
Triwulan III Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan	Target 2023	Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III Tahun 2022	Realisasi TW III 2023 dibandingkan TW III 2022	Target 2023	Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra
0	0	0.00%	0	0	82	0.00%	85	0.00

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini dan pengisian SMART hingga saat ini masih terintegrasi dengan aplikasi SAKTI sehingga dibutuhkan berkoordinasi dengan operator komitmen dalam hal pengisian capaian output aplikasi SAKTI.

21. IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok;

IKU tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup BPBL Lombok yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan PBJ BPBL Lombok diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Manajemen Risiko PBJ Strategis (5%)
2. Aktivitas Pengendalian telah dilaksanakan sesuai Manajemen Risiko yang disusun (5%)
3. Paket pengadaan melalui penyedia yang telah diumumkan dalam SIRUP (5%)
4. Ketersediaan KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak pada paket pengadaan dengan kontrak berbentuk Surat Perjanjian (5%)

5. HPS pada paket pengadaan dengan kontrak berbentuk Surat Perjanjian dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan (5%)
6. Pemilihan penyedia barang/Jasa untuk pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian yang dilaksanakan melalui SPSE (10%)
- 7) Jumlah pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian yang telah dikontrakkan (Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa) (11,25%)
- 8) Kesesuaian waktu penyelesaian pengadaan barang/jasa dengan kontrak berbentuk surat perjanjian (11,25%)
- 9) Kesesuaian kuantitas (jumlah/volume) pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian (11,25%)
- 10) Kesesuaian spesifikasi pengadaan BARANG dengan kontrak berbentuk surat perjanjian (11,25%)
- 11) Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan PBJ (5%)
- 12) Hasil pengawasan Inspektorat Mitra terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa ditindaklanjuti oleh Unit yang bersangkutan (15%)
- 13) Persentase besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa (TKDN)

Pada triwulan sebelumnya permasalahan yang terjadi adalah adanya perubahan juknis penyaluran bantuan pemerintah bioflok dari Peraturan Dirjen No. 182 Tahun 2023 menjadi Peraturan Dirjen No 262 Tahun 2023 yang baru ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2023.

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan III Tahun 2023 adalah mempercepat proses pengadaan bioflok sehingga beberapa paket bioflok dapat disalurkan pada Triwulan III ini.

IKU ini belum dapat dibandingkan dengan UPT lainnya dan tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu karena capaian akan dihitung pada akhir tahun. Adapun tampilan secara singkat atas capaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :

Tabel 36. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok

Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok								
Nama Indikator : Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok								
Triwulan III Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan	Target 2023	Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III Tahun 2022	Realisasi TW III 2023 dibandingkan TW III 2022		Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra
0	0	0.00%	0	0	77.5	0.00%	72.5	0.00

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada Indikator kinerja ini dan Pada Triwulan III Tahun 2023 permasalahan yang terjadi adalah adanya penambahan bantuan sarana dan prasarana bioflok pada akhir triwulan III sehingga BPBL lombok harus segera melakukan proses pengadaan sebelum akhir tahun

Tindak lanjut ke depannya dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah menginstruksikan tim PBJ untuk mempercepat proses pengadaan bioflok tahap II supaya proses pengadaan bisa terlaksanakan dan paket bioflok bisa disalurkan tepat waktu .

22. IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPBL Lombok;

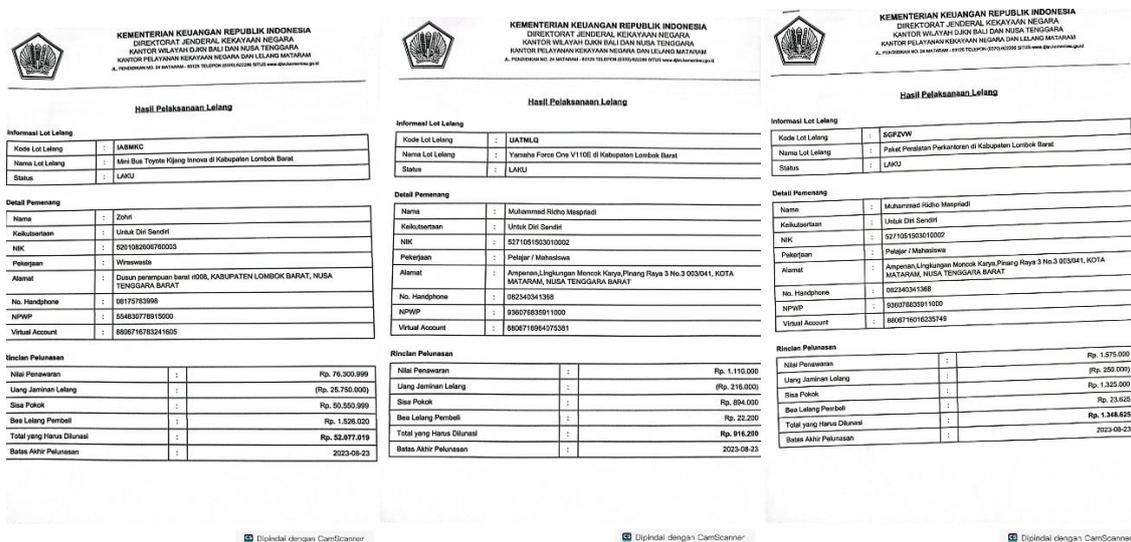
Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup BPBL Lombok yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (25%).
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN (15%).
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat (15%).
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2021 (20%)
5. Penyusunan Laporan BMN secara tepat waktu (25%).

Pada triwulan sebelumnya permasalahan yang terjadi adalah adanya barang rusak berat yang sudah dipindahkan ke Sekotong, namun belum bisa dilakukan proses lelang.

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan III Tahun 2023 ini adalah melakukan proses lelang untuk beberapa barang rusak berat, berikut adalah dokumentasi dokumen atas beberapa barang rusak berat yang telah dilelang pada Triwulan III Tahun 2023 :



Gambar 18. Dokumen pelaksanaan lelang

IKU ini belum dapat dibandingkan dengan UPT lainnya dan tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu karena capaian akan dihitung pada akhir tahun. Adapun tampilan secara singkat atas capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkup Satker BPBL Lombok adalah sebagai berikut :

Tabel 37. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPBL Lombok

Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok							
Nama Indikator : Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPBL Lombok							
Triwulan III Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan	Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III Tahun 2022	Realisasi TW III 2023 dibandingkan TW III 2022	Target 2023	Target Tahunan (%)	Target 2024 Realisasi terhadap target akhir renstra
0	0	0.00%	0	0	77.5	0.00%	72.5 0.00

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini dan permasalahan pada Triwulan III Tahun 2023 adalah pada saat ini sedang dalam proses pengajuan PSP (Penetapan Status Penggunaan) dan penghapusan dan berkas masih sedang diproses oleh eselon I DJPB.

Tindak lanjut ke depannya dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah koordinasi dengan eselon I DJPB terkait PSP dan penghapusan BPBL Lombok

23. IKU Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan data KUSUKA (%)

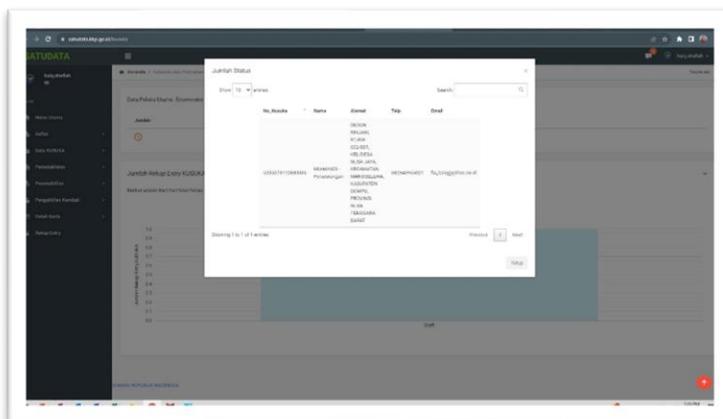
Persentase pelaku usaha budidaya ikan yang terintegrasi KUSUKA, merupakan penilaian atas capaian pendataan pelaku usaha yang telah terdaftar di database KUSUKA dengan status submit valid dan revisi. Pendataan pelaku usaha bertujuan untuk mengumpulkan/updating data pelaku usaha budidaya ikan. Pendataan KUSUKA dihitung mulai 1 Januari s.d. 31 Desember 2023, dengan baseline data hasil pendataan terakhir tahun 2022 (31 Desember 2022).

IKU ini merupakan IKU Baru dimana pada Tahun 2022 tidak ada Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan data KUSUKA, namun pada Tahun 2023 ini BPBL Lombok mendapat tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pada Triwulan sebelumnya permasalahan yang terjadi adalah aplikasi masih sering mengalami down atau error.

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan III Tahun 2023 ini adalah berkoordinasi dengan pusdatin dimana pada TW III ini sudah dapat dilakukan pengisian data perorangan pada aplikasi tersebut, berikut adalah dokumentasi salah satu pengisian data yang berhasil dilakukan

:



Gambar 19. Pengisian data pada aplikasi KUSUKA

IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan UPT lainnya karena capaian pada akhir tahun dan tidak dapat dibandingkan dengan IKU tahun sebelumnya karena tahun 2022 tidak ada IKU Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan data KUSUKA. Adapun tampilan secara singkat atas capaian IKU Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan data KUSUKA adalah sebagai berikut:

Tabel 38. Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi

Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok								
Nama Indikator : Persentase Pelaku Usaha Budi daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA								
Triwulan III Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan	Target 2023	Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III Tahun 2022	Realisasi TW III 2023 dibandingkan TW III 2022		Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra
0	0	0.00%	0	0	80	0.00%	80	0.00

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini dan permasalahan pada Triwulan III Tahun 2023 ini adalah meskipun sudah dilakukan pengisian data perorangan pada aplikasi namun aplikasi masih sering mengalami error sehingga pengisian data menjadi terhambat.

Tindak lanjut ke depannya dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah tetap berkomunikasi kepada tim PUSDATIN apabila mengalami kendala dalam penginputan data.

24. IKU Indeks pengelolaan kepegawaian

IKU indeks Pengelolaan pegawai adalah proses pengelolaan pegawai mulai dari pengangkatan hingga pemberhentian bagi pegawai lingkup BPBL Lombok. Proses tersebut dibagi dalam 3 (tiga) rumpun, yaitu : (1) proses Mutasi, yang terdiri dari proses pengangkatan CANS, pengangkatan CPNS menjadi PNS, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengangkatan pertama dalam jabatan, perpindahan jabatan, pencantuman gelar pendidikan, proses peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, perpindahan SDM Aparatur dan pemberhentian; (2) proses ketatausahaan, yang terdiri dari proses pembuatan kartu pegawai/istri/suami, proses izin cuti, dan pemberian penghargaan atau sanksi, dan (3) informasi ASN, yang terdiri dari : rekapitulasi kehadiran, perhitungan tunjangan kinerja, pelaksanaan pengambilan sumpah PNS, dan peremajaan data ASN. Indeks pengelolaan kepegawaian merupakan pengukuran kualitas proses pengelolaan pegawai, yang menyatakan tingkat penyimpangan proses dalam standar mutu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IKU ini merupakan IKU Baru dimana pada Tahun 2022 tidak ada penilaian indeks pengelolaan kepegawaian, namun pada Tahun 2023 ini dilakukan penilaian indeks pengelolaan kepegawaian tersebut.

Permasalahan pada triwulan sebelumnya adalah masih adanya ASN yang tidak konfirmasi apabila mengadakan perjalanan dinas secara mendadak yang menyebabkan rekap kehadiran pegawai saat awal bulan berikutnya tidak sesuai

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan III Tahun 2023 ini adalah menyampaikan kepada seluruh ASN yang sedang melaksanakan perjalanan dinas secara mendadak untuk mengkonfirmasi ketidakhadiran di kantor via telpon supaya pengelola kepegawaian bisa melakukan pengecekan kembali sebelum rekap absensi di awal bulan berikutnya.

IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan UPT lainnya karena capaian pada akhir tahun dan tidak dapat dibandingkan dengan IKU tahun sebelumnya karena tahun 2022 tidak ada IKU indeks pengelolaan kepegawaian. Adapun tampilan secara singkat atas capaian IKU indeks pengelolaan kepegawaian adalah sebagai berikut:

Tabel 39. Indeks Pengelolaan kepegawaian

Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok								
Nama Indikator :Indeks Pengelolaan Kepegawaian								
Triwulan III Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan	Target 2023	Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III Tahun 2022	Realisasi TW III 2023 dibandingkan TW III 2022		Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra
0	0	0.00%	0	0	3	0.00%	3	0.00

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini dan Permasalahan pada Triwulan III Tahun 2023 adalah bahwa dalam aplikasi e-Kinerja BKN kepala balai yang lama masih teregister sebagai kepala balai BPBL Lombok sehingga BPBL Lombok tidak bisa membuat SKP dengan sistem kerja yang baru.

Tindak lanjut ke depannya dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah Koordinasi dengan bagian SDM AO untuk mengubah jabatan kepala balai yang baru di e-kinerja BKN.

25. IKU Nilai Pengawasan kearsipan ;

Kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Pada Triwulan sebelumnya permasalahan yang terjadi adalah masih kurang rapihnya draft pengusulan surat melalui TTDE meskipun sudah dilakukan bimbingan Teknis.

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan III Tahun 2023 ini adalah pembuatan draft surat yang telah paten sehingga ASN yang akan mengusulkan draft surat tidak harus berkali-kali mengusulkan draft karena kesalahan huruf atau spasi.

IKU ini belum dapat dibandingkan dengan UPT lainnya dan tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu karena capaian akan dihitung pada akhir tahun. Adapun tampilan secara singkat atas capaian nilai pengawasan kearsipan adalah sebagai berikut :

Tabel 40. Nilai Pengawasan Kearsipan

Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok								
Nama Indikator :Nilai Pengawasan Kearsipan BPBL Lombok								
Triwulan III Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan	Target 2023	Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III Tahun 2022	Realisasi TW III 2023 dibandingkan TW III 2022		Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra
0	0	0.00%	0	0	75	0.00%	75	0.00

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini dan permasalahan pada Triwulan III Tahun 2023 adalah Pengelolaan arsip data yang belum rapih.

Tindak lanjut ke depannya dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah menginstruksikan kasubbag umum untuk mengelola kearsipan di BPBL Lombok

3.2. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dalam membiayai program peningkatan produksi perikanan budidaya laut mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBN sebesar **Rp. 34.071.515.000-** (Tiga Puluh Empat Miliar Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) dan dari dana yang dialokasikan tersebut, sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp 15.941.882.681 atau 46,79% dari pagu.

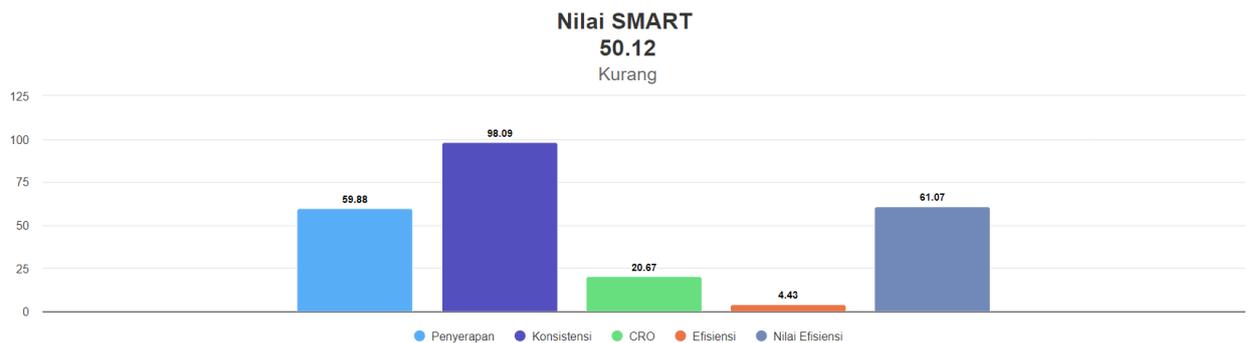
TIDAK ADA FILTER

NO	SATKER	NAMA SATKER	BAES1	KEGIATAN	KRO/RO	URAIAN RO	AKUN	BELANJA (DATA OMSPAN)		
								PAGU	REALISASI*	%
		BUDIDAYA LAUT LOMBOK				Air tawar yang disalurkan ke masyarakat				
3	567762	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	03204	2344	QELU05	Calon Induk Unggul ikan laut yang disalurkan ke masyarakat		10,000,000	0	0.00
4	567762	BALAI	03204	2344	QELU06	Benih Ikan Air		284,600,000	207,238,750	72.82
Total/Jumlah					24	Baris		34,071,515,000	15,941,882,681	46.79

Gambar 20. Capaian Kinerja Anggaran berdasarkan aplikasi OM SPAN

3.3. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Berikut ini adalah hasil efisiensi anggaran di BPBL Lombok berdasarkan aplikasi Smart DJA :



Gambar 21. Hasil efisiensi berdasarkan aplikasi SMART DJA

Berdasarkan hasil tersebut, dapat kita ketahui bahwa nilai efisiensi BPBL Lombok adalah 50,12

BAB 4. PENUTUP

Laporan Kinerja BPBL Lombok Triwulan III Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

Pada Triwulan III Tahun 2023, hasil pengukuran dan analisa yang dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif pada seluruh indikator-indikator utama (IKU) yang menjadi target BPBL Lombok didapatkan hasil dari 25 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 5 (Lima) Indikator kinerja yang mencapai target yang telah ditentukan pada Triwulan III Tahun 2023, yaitu :

- Persentase Calon Induk Unggul yang Diproduksi sebesar 60,07% dari target 50%;
- Persentase Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan Skala Intermediate yang Diproduksi sebesar 84,40 % dari target 75%
- Persentase Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan yang Diuji sebesar 161,75% dari target 75%;
- Persentase Pengujian Antimikrobal Resistance (AMR) sebesar 82,35% dari target 75%;
- Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPBL Lombok sebesar 93,33% dari target 75%;

Sementara terdapat 19 (Sembilan belas) indikator yang belum bisa dihitung pada Triwulan II Tahun 2023, yaitu :

1. Persentase bantuan sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang disalurkan;
2. Persentase bantuan benih yang disalurkan;
3. Persentase bantuan calon induk yang disalurkan;
4. Persentase Keberhasilan Pengembangan Benih pada Komoditas Lobster;
5. Persentase sarana dan prasarana bioflok yang disalurkan
6. Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan;
7. Persentase Model Usaha Pembesaran Budidaya Lobster yang Dikembangkan;

8. Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Hias yang disalurkan;
9. Indeks profesionalitas ASN lingkup BPBL Lombok;
10. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi ;
11. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBL Lombok ;
12. Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPBL Lombok;
13. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPBL Lombok (Nilai);
14. Nilai Kinerja Anggaran BPBL Lombok ;
15. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok;
16. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPBL Lombok ;
17. Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA;
18. Indeks Pengelolaan Kepegawaian;
19. Nilai Pengawasan Kearsipan BPBL Lombok

Sedangkan 1 (Satu) indikator yang tidak tercapai pada Triwulan III Tahun 2023, yaitu :

- Nilai PNBK BPBL Lombok sebesar Rp.522.106.939 dari target Rp 550.000.000 ;

Selanjutnya, dalam menyelesaikan masalah dan meningkatkan kinerja BPBL Lombok beberapa upaya-upaya konkrit yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Mengoptimalkan produksi lobster untuk mendongkrak nilai PNBK;
2. Meningkatkan pelayanan dan fasilitas asrama sehingga mampu menambah jumlah *stakeholder* pengguna asrama setiap tahunnya.
3. Melakukan penggantian akun kepala balai di beberapa aplikasi yang ada.
4. Melakukan perubahan tim kerja setelah dilakukan evaluasi oleh KemenPAN-RB.
5. Menyelesaikan penyaluran bantuan pada Triwulan berikutnya.

Akhirnya, Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran capaian-capaian output dari IKU yang telah ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) antara Dirjen Perikanan Budidaya dan Kepala BPBL Lombok. Lebih lanjut lagi, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan/ input dalam merumuskan kebijakan baik di level UPT maupun di tingkatan yang lebih tinggi (level pusat) di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) BPBL Lombok Triwulan III Tahun 2023 ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.